

# LAKIN 2023



LAPORAN KINERJA | BIRO PERENCANAAN



**BADAN PUSAT STATISTIK**

# LAKIN 2023



LAPORAN KINERJA | BIRO PERENCANAAN



**BADAN PUSAT STATISTIK**

# Laporan Kinerja Biro Perencanaan 2023



**ISSN/ISBN: -**

No. Publikasi:

**02100.24004**

Katalog:

**1202155**

Ukuran Buku

**21 x 29,7 cm**

Ukuran Buku

**viii + 67 halaman**

Naskah:

**Biro Perencanaan**

Penyunting:

**Biro Perencanaan**

Gambar Kover dan Layouting:

**Biro Perencanaan**

Ilustrasi Kover:

**Biro Perencanaan**

Diterbitkan oleh:

**Badan Pusat Statistik**

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



## Kata Pengantar

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan sebagai salah satu unit kerja eselon II instansi di BPS atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target di lingkup Biro Perencanaan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diamanatkan kepada Biro Perencanaan.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja Biro Perencanaan terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023, perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir serta efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan Tahun Anggaran 2023. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi Biro Perencanaan BPS untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya terhadap penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan kinerja Biro Perencanaan di masa mendatang sangat kami hargai.

**Jakarta, 30 Januari 2024**  
**Kepala Biro Perencanaan,**

M. Nashrul Wajdi

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi	4
1.3. Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran	6
1.4. Potensi dan Permasalahan	9
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	12
2.2. Rencana Strategis 2020-2024	15
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023	20
3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan Pertama	22
3.1.2. Capaian Kinerja Tujuan Kedua	30
3.1.3. Capaian Kinerja Tujuan Ketiga	32
3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 s.d 2023	39
3.3. Prestasi dan Inovasi Tahun 2023	40
3.4. Realisasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	42
3.5. Realisasi dan Efisiensi Biro Perencanaan Tahun 2023	43
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Tinjauan Umum	47
4.2. Tindak Lanjut	49

# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	<i>Tim Kerja di Lingkungan Biro Perencanaan</i>	<b>3</b>
<b>Tabel 2</b>	<i>Alokasi Pagu Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2022 (dalam jutaan rupiah)</i>	<b>8</b>
<b>Tabel 3</b>	<i>Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan Tahun 2020-2024</i>	<b>16</b>
<b>Tabel 4</b>	<i>Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023</i>	<b>17</b>
<b>Tabel 5</b>	<i>Rata-Rata Capaian Kinerja Biro Perencanaan Menurut Sasaran Strategis Tahun 2023</i>	<b>21</b>
<b>Tabel 6</b>	<i>Capaian Kinerja Tujuan "Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu" Tahun 2022 s.d 2023</i>	<b>23</b>
<b>Tabel 7</b>	<i>Capaian Kinerja Tujuan "Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS" Tahun 2022 s.d 2023</i>	<b>30</b>
<b>Tabel 8</b>	<i>Capaian Kinerja Tujuan "Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik" Tahun 2022 s.d 2023</i>	<b>33</b>
<b>Tabel 9</b>	<i>Realisasi Kinerja Berdasarkan IKU Biro Perencanaan Tahun 2023</i>	<b>42</b>
<b>Tabel 10</b>	<i>Perbandingan Pagu Awal dan Pagu Akhir Biro Perencanaan Tahun 2023</i>	<b>43</b>
<b>Tabel 11</b>	<i>Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2023</i>	<b>44</b>
<b>Tabel 12</b>	<i>Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, dan Nilai Efisiensi Biro Perencanaan Tahun 2023</i>	<b>45</b>

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	<i>Struktur Organisasi Biro Bina Program Sebelum Pemberlakuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020</i>	<b>5</b>
<b>Gambar 2</b>	<i>Struktur Organisasi Biro Perencanaan Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020</i>	<b>5</b>
<b>Gambar 3</b>	<i>Proporsi Pegawai Biro Perencanaan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023</i>	<b>7</b>
<b>Gambar 4</b>	<i>Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Biro Perencanaan 2020-2024</i>	<b>13</b>
<b>Gambar 5</b>	<i>Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis</i>	<b>14</b>
<b>Gambar 6</b>	<i>Capaian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2020 - 2023</i>	<b>21</b>
<b>Gambar 7</b>	<i>Pagu (triliun), Realisasi Anggaran (triliun) dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Realisasi Anggaran terhadap Pagu Tahun 2022-2023 (persen)</i>	<b>27</b>
<b>Gambar 8</b>	<i>Capaian Kinerja Biro Perencanaan 2019 s.d 2023</i>	<b>39</b>
<b>Gambar 9</b>	<i>Piagam Penghargaan Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan</i>	<b>40</b>

# Ringkasan Eksekutif



Laporan Kinerja Biro Perencanaan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Biro Perencanaan merupakan unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring dan evaluasi serta transformasi statistik.

Pada tahun 2023, capaian kinerja Biro Perencanaan mencapai 100,82 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat peningkatan sebesar 0,65 persen dan dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Perencanaan di tahun 2023 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu lima tahun, capaian kinerja Biro Perencanaan terhadap total cukup fluktuatif. Realisasi capaian kinerja terendah ada pada tahun 2020 yaitu sebesar 98,60 persen.

Hal ini juga dikarenakan tahun 2020 merupakan periode pertama dari Renstra 2020-2024 sehingga merupakan nilai baseline. Capaian kinerja tertinggi ada pada tahun 2023 yaitu sebesar 100,82persen. Hal ini menunjukkan bahwa Biro Perencanaan secara terus menerus berusaha meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan.

KERJA SAMA TIM UNTUK  
PENINGKATAN KINERJA

*Pada tahun 2023,  
capaian kinerja Biro  
Perencanaan  
mencapai 100,82  
persen.*

Penyerapan anggaran yang dikelola oleh Biro Perencanaan di tahun 2023 sebesar Rp. 12.595.579.833,- atau 86,57 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 8,85 persen. Sasaran strategis "meningkatnya birokrasi yang akuntabel" memiliki persentase realisasi anggaran tertinggi yaitu 93,88 persen.



Biro Perencanaan juga telah melakukan berbagai upaya efisiensi anggaran. Seluruh sasaran strategis Biro Perencanaan memiliki nilai capaian kinerja lebih tinggi dibanding realisasi anggaran, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran pada keempat sasaran strategis tersebut. Berdasarkan rata-rata sasaran, capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi anggaran yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Biro Perencanaan telah melakukan upaya efisiensi anggaran di tahun 2023.





# Bab I

# Pendahuluan

- Latar Belakang
- Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
- Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran
- Potensi dan Permasalahan
- Sistematika Penyajian Laporan

**B**iro Perencanaan yang merupakan unit kerja eselon II BPS di bawah Sekretariat Utama yang mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring dan evaluasi serta transformasi statistik. Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, koordinasi dan pelaksanaan penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi, dan pelaksanaan transformasi statistik.

Salah satu perubahan mendasar sebagai implementasi dari Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 adalah perubahan pola kerja yang semula adalah berbasis struktural dimana Biro Bina Program (sebelum berubah nomenklatur) terdiri atas empat bagian yaitu Bagian Penyusunan Rencana, Bagian Penyusunan Anggaran, Bagian Monitoring dan Evaluasi serta Bagian Transformasi Statistik, dimana setiap bagian tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Dengan peraturan baru tersebut, pejabat struktural berubah menjadi jabatan fungsional. Mulai akhir tahun 2020, perubahan pola kerja baru diimplementasikan secara bertahap.

Tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Biro Perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2023, Kepala Biro Perencanaan menetapkan sebanyak 21 (dua puluh satu) Tim Kerja di Biro Perencanaan, yang terdiri atas 14 Tim Kerja yang mendukung untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Biro Perencanaan dan 7 Tim Kerja Ad-Hoc yang berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan tugas-tugas Biro Perencanaan lainnya.

Biro Perencanaan BPS dijalankan melalui satu program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya yaitu Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran. Adapun sasaran strategis yang dirumuskan yaitu (1) Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu, (2) Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, (3) Terlaksananya transformasi statistik BPS, dan (4) Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS.

# Latar Belakang

## *Biro Perencanaan*

Rencana Strategis Biro Perencanaan 2020-2024 telah disusun sebagai arah program dan kegiatan yang akan dicapai Biro Perencanaan selama lima tahun ke depan. Di awal tahun 2022, Biro Perencanaan juga telah melakukan Reviu Renstra Biro Perencanaan 2020-2024 untuk penyesuaian target sampai dengan 2024. Untuk mengukur keberhasilan Biro Perencanaan dalam pencapaian kegiatan tahun 2023, maka pada awal tahun 2023 juga telah ditetapkan target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2023. Target tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan 2023. Sedangkan Laporan Kinerja Biro Perencanaan 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja unit kerja instansi pemerintah.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Biro Perencanaan BPS Tahun 2020-2024, sehingga dalam laporan ini juga berisi perbandingan dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022. Diharapkan laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

# Tabel 1

## Tim Kerja di Lingkungan Biro Perencanaan

IKU 1.11 Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu	
Tim 1	Perencanaan Teknis
Tim 2	Perencanaan Non Teknis
Tim 3	Standarisasi dan Regulasi
Tim 4	Perencanaan Jangka Menengah
Tim 5	Pelaksanaan Anggaran 1
Tim 6	Pelaksanaan Anggaran 2
Tim 7	Monitoring Kinerja Instansi
Tim 8	Pelaporan Monitoring Eksternal
IKU 1.12 Persentase realisasi anggaran terhadap pagu	
Tim 9	Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Tim 10	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
IKU 2.11 Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	
Tim 11	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
IKU 3.11 Jumlah laporan transformasi statistik	
Tim 12	Transformasi Statistik
IKU 3.21 Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	
Tim 13	Manajemen Perubahan
Tim 14	Reformasi Birokrasi
Ad-Hoc	
Tim 15	Hubungan Kelembagaan
Tim 16	Urusan SDM dan Rumah Tangga
Tim 17	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Tim 18	Kreativitas
Tim 19	Penyiapan Materi Pimpinan
Tim 20	Pengelolaan SDM Non PNS - PPIS
Tim 21	Pengendali Teknis

# *Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan* **Organisasi**

**U**ndang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan konstitusional Badan Pusat

Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kewenangan menyelenggarakan statistik dasar. Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Biro Perencanaan berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

## **a. Tugas**

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta transformasi statistik.

## **b. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

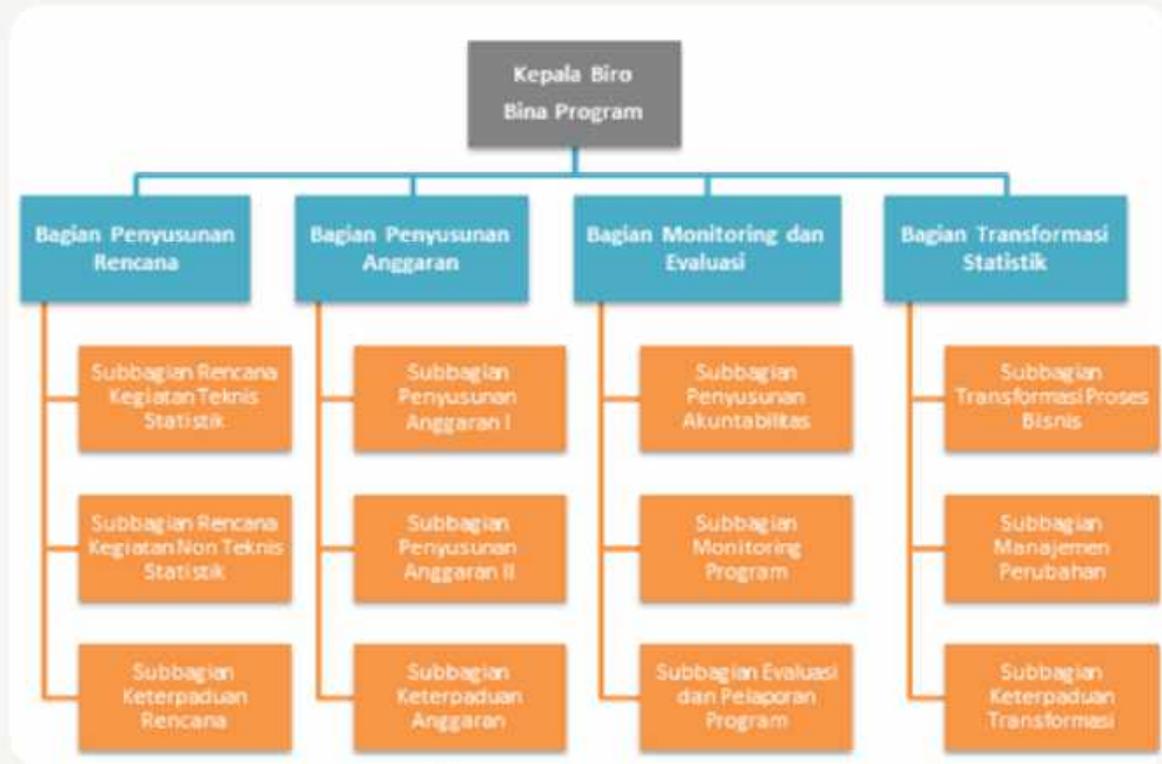
1. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana;
2. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan anggaran;
3. Monitoring dan evaluasi; dan
4. Pelaksanaan transformasi statistik.

## **c. Susunan Organisasi**

Sebelum diberlakukannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Biro Perencanaan bernama Biro Bina Program. Struktur organisasi Biro Bina Program terdiri dari 4 Bagian yang dikepalai Eselon III/Kepala Bagian dan tiap bagian terdiri dari 3 (tiga) eselon IV/Kepala Sub Bagian. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden tentang penyederhanaan birokrasi sampai 2 level (Eselon II), maka BPS mengeluarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik tanggal 17 Desember 2020. Dalam Peraturan Badan tersebut, susunan organisasi dan tata kerja Biro Perencanaan tidak lagi terdiri dari bagian-bagian tetapi terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional tersebut langsung berada di bawah Kepala Biro Perencanaan.

Jabatan fungsional yang ada di Biro Perencanaan sampai saat ini terdiri dari:

- Fungsional Perencana : Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya;
- Fungsional Analisis Anggaran : Ahli Pertama dan Ahli Muda;
- Fungsional Statistisi: Ahli Pertama dan Ahli Muda.



*Gambar 1*  
 Struktur Organisasi Biro Bina Program Sebelum Pemberlakuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020



*Gambar 2*  
 Struktur Organisasi Biro Perencanaan Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Adanya Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.



# Sumber Daya Manusia *dan Dukungan Anggaran*

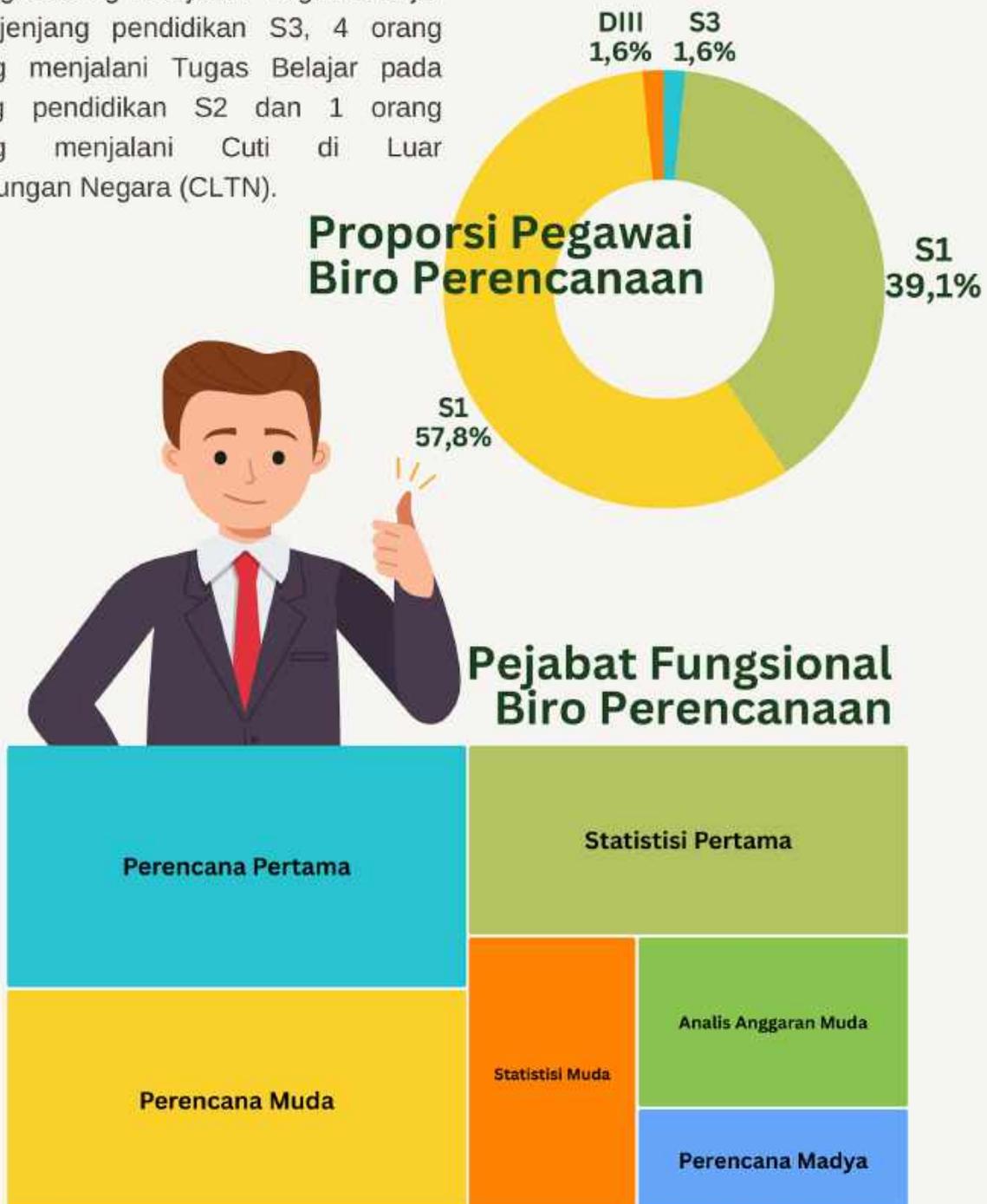
**S**umber daya manusia memegang peranan penting dalam mencapai keberhasilan tugas dan fungsi Biro

Perencanaan. Jumlah pegawai di lingkup Biro Perencanaan kondisi Desember 2023 yaitu sebanyak 64 orang. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai di Biro Perencanaan berpendidikan S1/ sederajat dan S2. Dari 64 orang pegawai di Biro Perencanaan

tercatat sebanyak 1 pegawai berpendidikan S3, 25 pegawai berpendidikan S2, 37 pegawai berpendidikan S1/ sederajat, dan 1 pegawai berpendidikan DIII ke bawah. Proporsi pegawai Biro Perencanaan menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3.

Diantara pegawai tersebut sampai dengan kondisi bulan Desember 2023, sebanyak 2 orang sedang menjalani Tugas Belajar pada jenjang pendidikan S3, 4 orang sedang menjalani Tugas Belajar pada jenjang pendidikan S2 dan 1 orang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).

*Gambar 3*  
**Proporsi Pegawai Biro Perencanaan menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan Fungsional Tahun 2023**



Pada awal tahun sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-054.01.1.018576/2023, Biro Perencanaan menerima pagu anggaran sekitar Rp. 16,82 miliar dalam rupiah murni. Anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan yang terbagi dalam 5 Rincian Output (RO). Pagu paling besar dialokasikan untuk RO Layanan Reformasi Kinerja sebesar Rp. 13,05 miliar atau 77,59 persen dari total anggaran Biro Perencanaan. Selanjutnya RO Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I

sebesar Rp. 1,69 miliar (10,09 %) dan RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp. 1,64 miliar (9,80 %).

Pada tahun 2023, BPS melakukan revisi DIPA sebanyak 13 kali. Pagu akhir Biro Perencanaan sebesar Rp. 14,55 miliar atau berkurang sebesar Rp. 2,27 miliar. Pengurangan ini diakibatkan beberapa hal yaitu realokasi anggaran Automatic Adjustment ke BA BUN, realokasi anggaran untuk pemenuhan kekurangan belanja gaji dan realokasi ke BPS Daerah untuk pemenuhan kebutuhan operasional dan non operasional di BPS Daerah.

*Tabel 2*

## Alokasi Pagu Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2023 (dalam jutaan rupiah)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output (RO)	Pagu Awal		Pagu Akhir	
	Pagu Awal	% terhadap Pagu Total	Pagu Akhir	% terhadap Pagu Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>2881 EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>16.819,852</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.549,989</b>	<b>100,00%</b>
1A5 Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I	1.696,515	10,09%	453,702	3,12%
2A5 Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I	239,003	1,42%	158,443	1,09%
952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.648,925	9,80%	7.747,779	53,25%
953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	185,457	1,10%	189,752	1,30%
961 Layanan Reformasi Kinerja	13.049,952	77,59%	6.000,313	41,24%
<b>Total Pagu Biro Perencanaan</b>	<b>16.819,852</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.549,989</b>	<b>100,00%</b>

# Potensi

## *dan Permasalahan*

**B**erdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Biro Perencanaan merupakan unit kerja eselon II BPS di bawah Sekretariat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta transformasi statistik. Regulasi tersebut memberikan jaminan bagi Biro Perencanaan untuk menjalankan fungsi koordinasi dalam rangka mendukung kesuksesan penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan pada bidang pengelolaan anggaran dan kinerja baik di pusat maupun di daerah.

Selain dukungan regulasi, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki menjadi salah satu potensi Biro Perencanaan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2023, pegawai di Biro Perencanaan didominasi pegawai dengan pendidikan S1 ke atas. Dukungan SDM yang kuat dapat dimaksimalkan oleh Biro Perencanaan untuk terus berinovasi dalam menyelesaikan tugasnya. Dukungan sarana dan prasarana juga menjadi salah satu potensi yang dapat

dimanfaatkan oleh Biro Perencanaan dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan sarana penunjang berupa laptop untuk pegawai (one man one laptop) di Biro Perencanaan diharapkan dapat mendukung pekerjaan sehari-hari. Terutama dalam hal menunjang praktek Flexible Working Arrangement (FWA) yang tahapan piloting atau uji cobanya tengah dilakukan oleh Biro Perencanaan di tahun 2023.

Adanya kebijakan eksternal seperti Automatic Adjustment yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan menjadi salah satu permasalahan yang memengaruhi perencanaan pelaksanaan kegiatan di BPS. Beberapa kegiatan survei dihentikan dan sebagian lainnya harus mengalami beberapa penyesuaian dari sisi perencanaan. Adanya pelaksanaan survei dengan kerjasama swakelola tipe 2 dengan skema anggaran PNBPN turut menjadi tantangan Biro Perencanaan dalam hal perencanaan teknis maupun anggaran BPS sehingga perlu dilakukan penyesuaian strategi khususnya dalam akselerasi penyerapan anggaran BPS.

# *Sistematika* **Penyajian** **Laporan**

**M**engacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LAKIN) Biro Perencanaan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

## **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, sumber daya manusia dan dukungan anggaran; potensi dan permasalahan; dan sistematika penyajian laporan.

## **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini disajikan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Biro Perencanaan; rencana strategis; dan perjanjian kinerja Biro Perencanaan.

## **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan analisis capaian kinerja Biro Perencanaan; prestasi dan inovasi; realisasi dan efisiensi anggaran tahun berjalan.

## **Bab IV Penutup**

Pada bab ini disajikan kesimpulan dan rencana tindak lanjut.

Lampiran.



# Bab II

# Perencanaan Kinerja

- Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
- Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan Tahun 2020-2024
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023

# Visi, Misi, Tujuan *dan Sasaran Strategis*

**D**alam melakukan tugasnya selama lima tahun, Biro Perencanaan telah menyusun Renstra Biro Perencanaan tahun 2020-2024 yang mengacu pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024. Pada awal tahun 2022, Biro Perencanaan melakukan reuiu Renstra Biro Perencanaan untuk periode 2020-2024. Hal tersebut dilakukan agar tujuan dan sasaran Biro Perencanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Utama. Renstra Biro Perencanaan tahun 2020-2024 disusun sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan, sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Biro Perencanaan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Biro Perencanaan yang tertuang dalam Renstra Biro Perencanaan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

## **a. Visi**

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta transformasi statistik.

## **a. Misi**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro Perencanaan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang berkesinambungan;
2. Meningkatkan kualitas sistem penganggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kinerja yang akurat; dan
4. Menyelenggarakan *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics* (STATCAP-CERDAS).

### a. Tujuan dan Sasaran Strategis

Biro Perencanaan mempunyai tiga tujuan yang telah ditetapkan dalam Reviu Rencana Strategis Biro Bina Program tahun 2020-2024 yang mengacu dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

Tujuan Biro Perencanaan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut. Masing-masing tujuan dan sasaran strategis tersebut memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya.

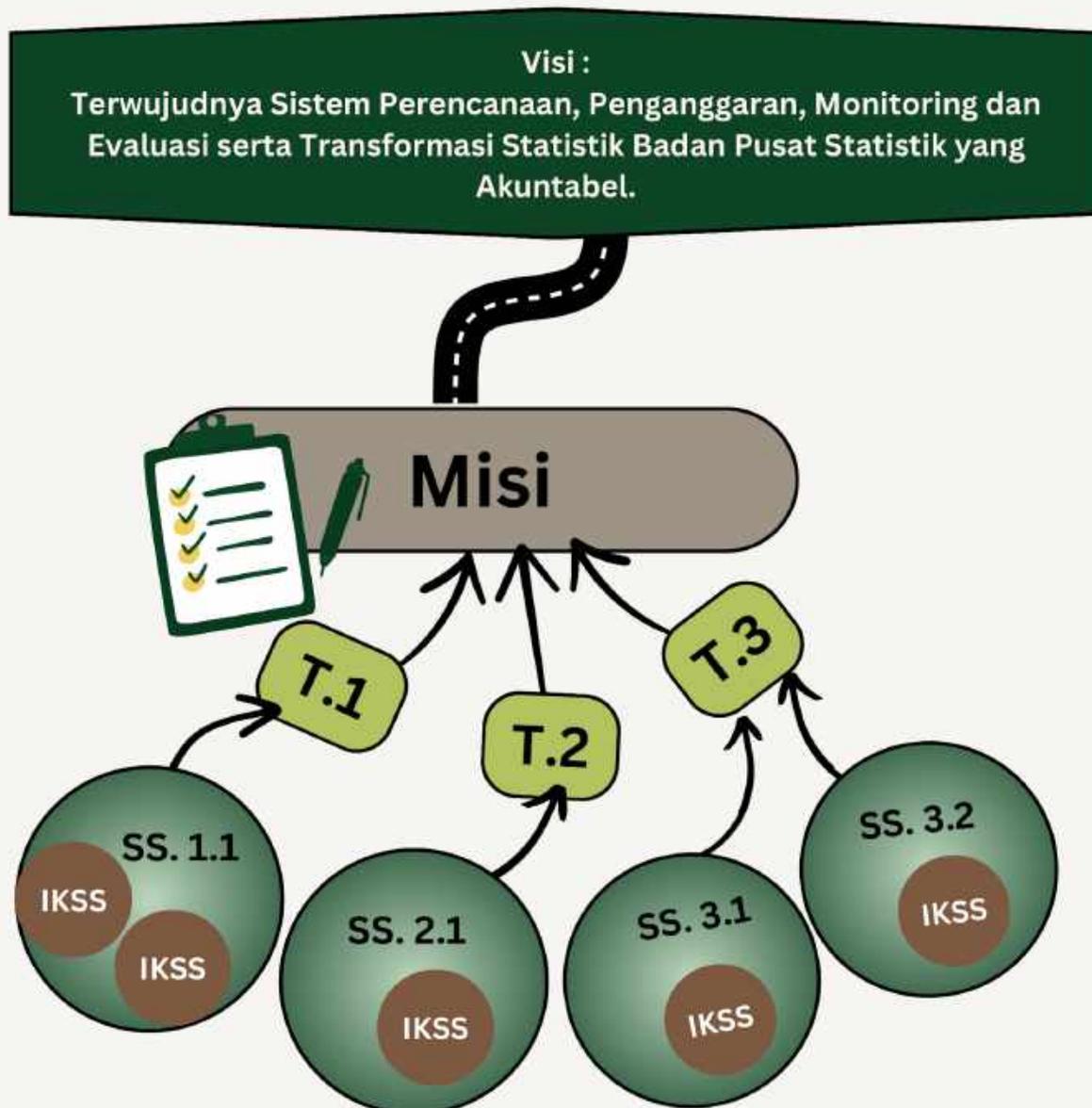
*Gambar 4*

## Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Sasaran Biro Perencanaan 2020-2024



Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Biro Perencanaan dapat terlihat pada gambar berikut ini:

*Gambar 5*  
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis



# Rencana Strategis (Renstra)

*Biro Perencanaan  
Tahun 2020-2024*

**R**encana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan disusun dengan muatan di dalamnya meliputi visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan sebagai unit kerja di Badan Pusat Statistik di bawah Sekretariat Utama. Dalam Renstra Biro Perencanaan Tahun 2020-2024 memuat target kinerja yang menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU Biro Perencanaan telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

## Tabel 3

## Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tujuan 1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu						
	SS.1.1. Meningkatkan perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu	1.1.1. Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu	100	100	100	100	100
		1.1.2. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	95	95	95	95	95
2	Tujuan 2. Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS						
	SS.2.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	2.1.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	78	78	78	79	80
3	Tujuan 3. Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik						
	SS.3.1. Terlaksananya transformasi statistik BPS	3.1.1. Jumlah laporan transformasi statistik	1	1	1	1	1
	SS.3.2. Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS	3.2.1. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	79	79	80	81	82

**P**ada awal tahun 2023, Biro Perencanaan telah menetapkan target yang harus dicapai dan menjadi ukuran keberhasilan

Biro Perencanaan dalam memenuhi tugasnya di tahun 2023. Target tersebut dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan yang merupakan bentuk komitmen Kepala Biro Perencanaan kepada Sekretaris Utama BPS. Target kinerja Biro Perencanaan disajikan pada Tabel 4.

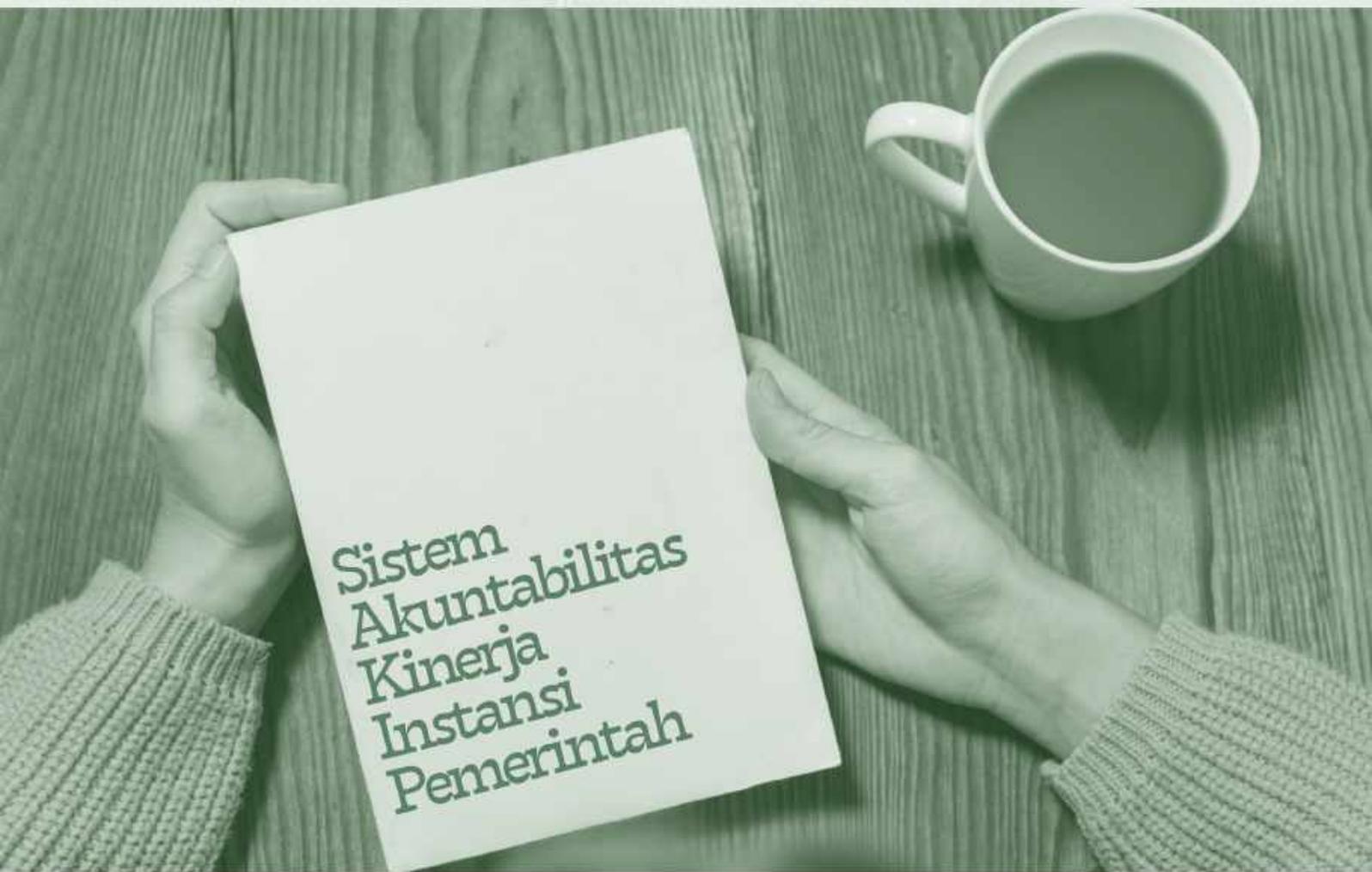
# Perjanjian Kinerja

*Biro Perencanaan  
Tahun 2023*

*Tabel 4*  
**Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tujuan 1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu			
	SS.1.1. Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu	1.1.1. Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu	Persen	100
		1.1.2. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu	Persen	95
		(%)		
2	Tujuan 2. Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BP			
	SS.2.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	2.1.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	79
3	Tujuan 3. Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik			
	SS.3.1. Terlaksananya transformasi statistik BPS	3.1.1. Jumlah laporan transformasi statistik	Laporan	1
	SS.3.2. Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS	3.2.1. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	81





# Bab III

# Akuntabilitas Kinerja

- Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023
- Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 s.d 2023
- Prestasi dan Inovasi Tahun 2023
- Realisasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama
- Realisasi dan Efisiensi Biro Perencanaan Tahun 2023

Akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan merupakan perwujudan kewajiban Biro Perencanaan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Biro Perencanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Biro Perencanaan 2023 dihitung

berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja selama tahun 2023 dengan target yang telah ditetapkan. Pada bab berikut dijelaskan mengenai analisis capaian kinerja meliputi evaluasi kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja, solusi yang telah dilakukan serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar capaian kinerja di tahun berikutnya meningkat.

# Realisasi *dan Capaian Kinerja Tahun 2023*

Capaian kinerja Biro Perencanaan pada tahun 2023 adalah sebesar 100,82 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat peningkatan sebesar 0,65 poin dan dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Perencanaan di tahun 2023 lebih baik. Jika dibandingkan terhadap target capaian, Biro Perencanaan telah melampaui target 100,00 persen yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Biro Perencanaan telah semakin meningkat sehingga selain dievaluasi kembali kendala-kendala yang dialami Biro Perencanaan, perlu juga dianalisa langkah-langkah kinerja strategis yang telah diupayakan Biro Perencanaan di tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pada periode 2020 s.d 2023, dapat dilihat pada Gambar 6, capaian kinerja Biro Perencanaan selalu mengalami peningkatan dimana pada periode awal Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan yaitu di tahun 2020, capaian kinerja Biro Perencanaan adalah sebesar 98,60 persen. Kecenderungan positif ini menunjukkan bahwa Biro Perencanaan selalu berusaha meningkatkan performanya setiap tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

*Gambar 6***Capaian Kinerja Biro Perencanaan  
Tahun 2020 - 2023**

Jika dilihat menurut sasaran strategis, capaian kinerja untuk SS 3.2 memiliki capaian yang paling tinggi yaitu sebesar 103,06 persen. Selanjutnya adalah SS 1.1 dengan capaian sebesar 101,05 persen, kemudian SS 3.1 dengan rata-rata capaian sebesar 100,00 persen dan terakhir SS 2.1 dengan capaian sebesar 98,92 persen.

*Tabel 5***Rata-Rata Capaian Kinerja Biro Perencanaan  
Menurut Sasaran Strategis Tahun 2023**

Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)
(2)	(3)	(7)
SS.1.1. Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu	2	101,05
SS.2.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	1	98,92
SS.3.1. Terlaksananya transformasi statistik BPS	1	100,00
SS.3.2. Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS	1	103,06
<b>Rata-Rata Sasaran</b>		<b>100,76</b>

# 3.1.1

## Capaian Kinerja *Tujuan Pertama*

**T**ujuan pertama Biro Perencanaan adalah “Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu”. Pada tujuan ini terdapat satu sasaran strategis yaitu “Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu” dan dua IKU yaitu “Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu” dan “Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)”. Capaian indikator tujuan pertama Biro Perencanaan pada tahun 2023 disajikan pada Tabel 5.

Capaian kinerja tujuan “Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu” dan sasaran strategis “Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu”

**mengalami peningkatan di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,04 poin**

## Tabel 6

Capaian Kinerja Tujuan  
 “Menyelenggarakan perencanaan dan  
 penganggaran yang terpadu”  
 Tahun 2022 s.d 2023

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>T1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu</b>							
<b>SS1.1 Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu</b>							
Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu	Persen	100,00	99,84	99,84	100,00	100,00	100,00
Persentase realisasi anggaran terhadap pagu	Persen	95,00	97,08	102,19	95,00	97,00	102,11
<b>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis Pertama dari Tujuan Pertama</b>				<b>101,02</b>	<b>101,06</b>		
<b>Capaian Kinerja Tujuan Pertama</b>				<b>101,02</b>	<b>101,06</b>		

### a. Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu dalam perencanaan dan penganggaran BPS sesuai tugas dan fungsi Biro Perencanaan dalam rangka menyusun pagu anggaran Badan Pusat Statistik. Sumber dan cara pengumpulan data untuk indikator ini adalah dari Form Rencana Aksi (FRA) dan Laporan Aktivitas BPS. Cara penghitungan indikator ini yaitu dengan menghitung jumlah dokumen/laporan terkait dengan perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan oleh kegiatan Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran yang terbit tepat waktu

dibagi dengan seluruh dokumen/laporan terkait dengan perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan oleh kegiatan Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran dikalikan 100 persen.

Indikator “Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang Terbit Tepat Waktu” pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100 persen. Dari target tersebut, Biro Perencanaan telah memenuhi target yang diharapkan dengan capaian sebesar 100 persen.

Pencapaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun capaian di tahun 2022 (99,84 persen),

**sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan capaian kinerja untuk indikator “Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu” sebesar 0,16 poin.**

Meskipun demikian, dalam perjalanannya proses kegiatan Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran di Biro Perencanaan pun mengalami masalah dan kendala yang pada akhirnya dapat diatasi dengan langkah-langkah yang solutif.

## Masalah/Kendala *yang Dihadapi*

1. Metodologi SE2026 (jumlah sampel dan petugas) yang akan dicantumkan dalam Dokumen Perka Masterplan dan Network Planning SE2026 perlu melalui banyak perbaikan oleh Tim Metodologi;
2. Penyusunan Standar Kebutuhan Sarpras Satker (SKSS) untuk tanah dan gedung kantor, tanah dan bangunan rumah dinas jabatan, kendaraan dinas jabatan, layanan listrik, air, internet, dan mebel pegawai, serta AC dan genset memerlukan evaluasi lebih lanjut, sehingga Perka Roadmap Sarpras, Buku Pedoman, dan Sistem Aplikasinya dapat disempurnakan untuk komponen sarpras di atas;
3. Proses reviu, harmonisasi dan penetapan Perka yang berkaitan dengan penetapan standar biaya yang dilakukan oleh Tim Hukum membutuhkan waktu lama. Selain itu
4. juga adanya kebijakan pimpinan yang berdampak pada standar biaya, termasuk munculnya kegiatan baru;
4. Tingkat pemahaman penyusunan Renstra yang masih berbeda-beda antar anggota tim;
5. Data kinerja untuk penyusunan LAKIN Triwulanan Unit Kerja Pusat masuk berdekatan dengan waktu deadline, sehingga jadwal penyusunan LAKIN menjadi pendek;
6. Aplikasi Laporan Pekerjaan Pimpinan, sering mengalami server error sehingga proses input laporan menjadi terkendala; Masih ada beberapa Provinsi yang terlambat mengirimkan laporan bulanan atau data laporannya belum sesuai; serta pengolahan data dengan cakupan seluruh satker BPS Selindo yang masih dilakukan secara manual, membutuhkan waktu dan ketelitian untuk memastikan

konsistensi data pagu, progress pengadaan, dan ketercapaian kegiatan;

7. Masih terdapat pelaporan data yang belum sesuai ketentuan baik itu p

elaporan capaian output di aplikasi SAKTI maupun pelaporan komponen/RO di aplikasi e-monev Bappenas; serta masih terdapat satker yang terlambat mengentri laporan semester I pada aplikasi SMART.

## Solusi Mengatasi *Masalah/Kendala*

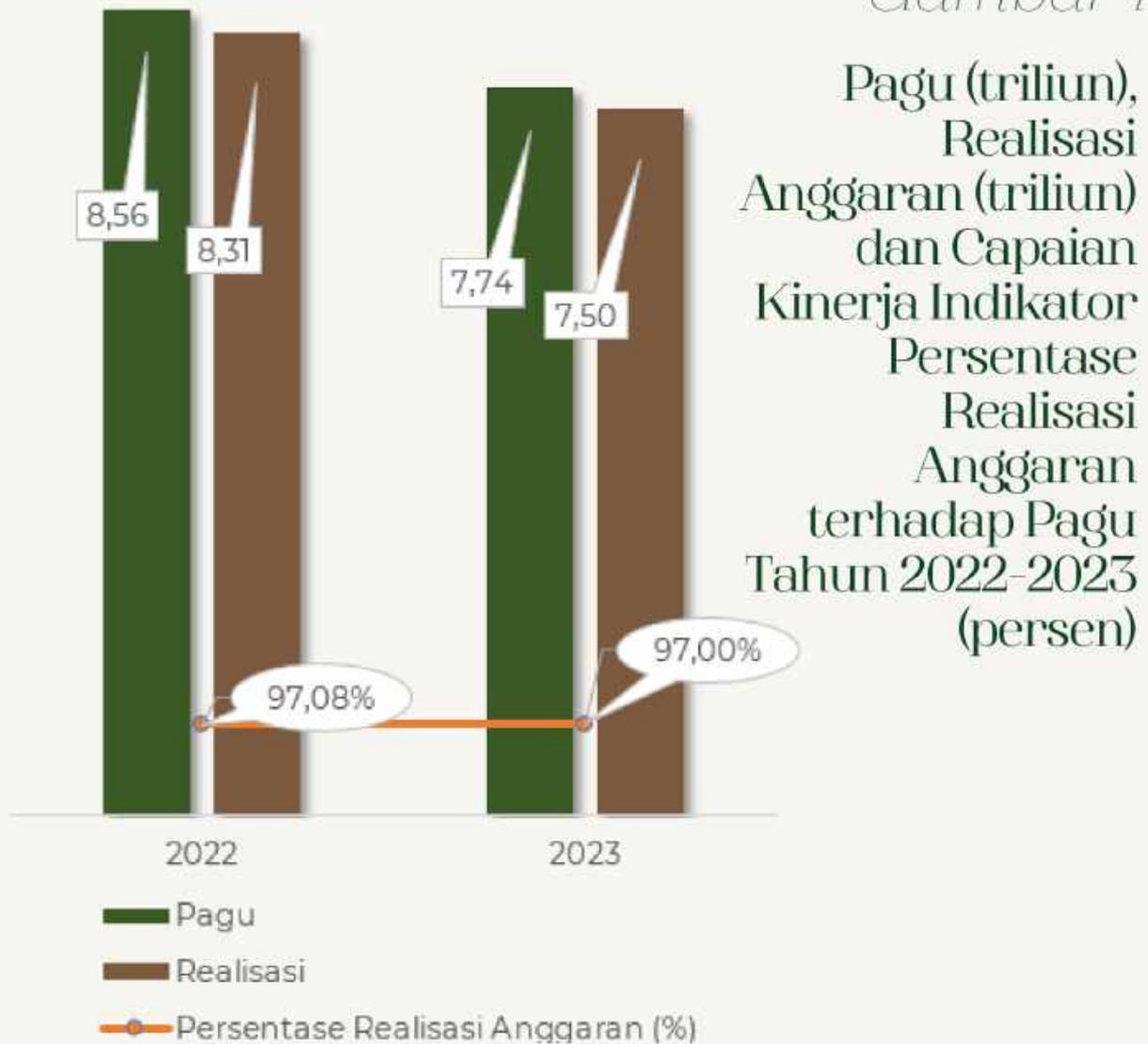
1. Tim Penyusunan Rencana Teknis yang terlibat dalam penyusunan dokumen Perka Masterplan dan Network Planning SE2026 terus melakukan diskusi intensif, khususnya dengan Tim Metodologi dan Tim Hukum;
2. Tim Penyusunan Rencana Non Teknis telah melakukan upaya evaluasi SKSS satker daerah pada 18 provinsi;
3. Tim Standarisasi dan Regulasi terus berupaya berkoordinasi dengan Tim Hukum serta melakukan update perihal adanya perubahan dan perkembangan yang berkaitan dengan kebijakan pimpinan;
4. Tim Perencanaan Jangka Menengah telah melaksanakan sosialisasi penyusunan Renstra dan penjenjangan kinerja dengan menghadirkan narasumber dari Bappenas dan Kemenpan RB;
5. Tim SAKIP di Biro Perencanaan telah melakukan koordinasi dengan setiap Tim SAKIP unit kerja pusat untuk mengakselerasi pemasukan data SAKIP Unit kerja pusat;
6. Tim Monitoring Kinerja Instansi berupaya melakukan koordinasi dengan Tim programmer dari Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) agar penanganan aplikasi dapat lebih cepat; secara berkala melakukan monitoring, reminder dan konfirmasi kepada PIC di BPS Provinsi; serta melakukan pengolahan, konfirmasi ke satker, penyesuaian pagu dan perbaikan dilakukan pada akhir periode laporan;
7. Tim Pelaporan Monitoring Eksternal melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan data agar lebih sesuai dengan ketentuan pelaporan; serta secara berkala melakukan reminder dan koordinasi dengan PIC BPS Provinsi untuk percepatan entri laporan semester I SMART.

# Rekomendasi

## *Tahun Berikutnya*

1. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi serta kolaborasi dengan Tim Kerja di luar unit kerja Biro Perencanaan, diantaranya:
  - a. Memitigasi keterlambatan penerbitan Perka dengan mengakselerasi penyelesaian produk hukum perencanaan dengan Tim Hukum pada tahun 2024 mendatang;
  - b. Memperkuat sinergitas dengan Tim Metodologi agar penyusunan rencana dan anggaran kegiatan tahun anggaran 2025 dapat lebih matang dan meminimalisasi adanya revisi;
  - c. Mendorong Tim SIS untuk dapat terus meningkatkan kualitas program/sistem aplikasi yang digunakan dalam mendukung kinerja di lingkup Biro Perencanaan; kedepannya diupayakan agar bisa dilakukan penyederhanaan dan integrasi sistem yang memiliki redundansi.
2. Pembinaan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran untuk unit kerja baik di BPS Pusat maupun di BPS Daerah.

Gambar 7



### a. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektifitas anggaran BPS sehingga menjadi pedoman dalam penyusunan pagu di tahun berikutnya. Sumber data untuk pengukuran kinerja indikator ini berasal dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Cara penghitungan indikator ini yaitu Jumlah realisasi anggaran Badan Pusat Statistik tahun ke-n dibagi jumlah pagu Badan Pusat Statistik tahun ke-n dikalikan dengan 100%.

Indikator "Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)" pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 95,00 persen. Dari target tersebut, Biro Perencanaan telah memenuhi target yang diharapkan dengan capaian sebesar 97,00 persen dengan capaian kinerja 102,11 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berhasil memperoleh capaian kinerja 102,19 persen, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan capaian di tahun 2023.

# Masalah/Kendala

## *yang Dihadapi*

1. Adanya belanja pegawai dan belanja modal yang tidak terealisasi;
2. Kebijakan pimpinan terkait teknis/prosedur pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) pada tahun anggaran berjalan menyebabkan serapan anggaran ST2023 tidak maksimal;
3. Penerapan prinsip pengelolaan anggaran 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis) menyebabkan adanya pembatasan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan paket meeting fullboard di satker Sekretariat Utama.

# Solusi Mengatasi

## *Masalah/Kendala*

1. Melakukan evaluasi perhitungan dasar hitung belanja pegawai serta pemetaan dan mitigasi penggunaan anggaran selama tahun anggaran berjalan, selaras dengan ditingkatkannya pelaksanaan monitoring pembangunan gedung kantor di beberapa satker BPS daerah;
2. Melakukan revisi POK dan revisi DIPA dalam rangka mengoptimalkan sisa anggaran yang belum terserap. Hal ini pun diiringi dengan arahan pimpinan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan ST2023 seperti *Personal Computer (PC); UPS dan Scanner;*
3. Potensi sisa anggaran akibat pembatasan pelaksanaan paket meeting dimanfaatkan untuk supervisi kegiatan di lapangan/BPS daerah sehingga dapat mendukung pencapaian output kinerja.

# Rekomendasi

## *Tahun Berikutnya*

1. Perbaiki perencanaan dan penganggaran dengan melakukan reviu DIPA secara periodik dan segera melakukan revisi anggaran hasil reviu;
2. Sejak adanya penerapan aturan izin clearance dari Kemenpan RB dan Kominfo untuk pelaksanaan pengadaan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK), maka sejak awal tahun anggaran berjalan seharusnya sudah mulai dilengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar anggaran yang masih dalam kondisi “blokir” pada DIPA dapat segera dibelanjakan;
3. Melakukan pencatatan realisasi belanja sesegera mungkin setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan, sehingga tidak ada pembayaran belanja yang terlambat;
4. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja;
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

## 3.1.2

# Capaian Kinerja

## *Tujuan Kedua*

Tujuan kedua Biro Perencanaan adalah “Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS”. Pada tujuan ini terdapat satu

sasaran strategis yaitu “Meningkatnya birokrasi yang akuntabel” dan satu IKU yaitu “Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB”. Capaian indikator tujuan kedua Biro Perencanaan pada tahun 2023 disajikan pada Tabel 6.

### *Tabel 7*

## Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS” Tahun 2022 s.d 2023

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>T2. Meningkatkan pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS</b>							
<b>SS2.1 Meningkatkan birokrasi yang akuntabel</b>							
Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	78,00	77,27	99,06%	79,00	78,15	98,92%
<b>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis Pertama dari Tujuan Kedua</b>				<b>99,06%</b>	<b>98,92%</b>		
<b>Capaian Kinerja Tujuan Kedua</b>				<b>99,06%</b>	<b>98,92%</b>		

Berdasarkan Tabel 7, meski secara realisasi poin nilai SAKIP di tahun 2023 telah mengalami kenaikan dari 77,27 (BB) menjadi 78,15 (BB), namun capaian kinerja tujuan "Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS" dan sasaran strategis "Meningkatnya birokrasi yang akuntabel" mengalami penurunan di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,14 poin. Terdapat satu indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan tersebut yaitu "Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB".

Indikator "Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB" pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 79,00 poin. Dari target tersebut dan berdasarkan nilai SAKIP BPS Tahun 2023 yaitu sebesar 78,15 maka capaian kinerja Biro Perencanaan untuk indikator ini adalah sebesar 98,92 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berhasil memperoleh capaian kinerja 99,06 persen, dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan capaian kinerja untuk indikator "Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB" sebesar 0,14 poin.

## Masalah/Kendala *yang Dihadapi*

1. Aplikasi SIMONEV belum mengakomodir fitur analisis efisiensi anggaran dan masih error untuk dashboard;
2. Timeline proses evaluasi SAKIP internal tidak jelas dan tidak ada info evaluator yg melakukan evaluasi sehingga proses konfirmasi pemenuhan kebutuhan dokumen SAKIP tidak bisa dilakukan.

## Solusi Mengatasi *Masalah/Kendala*

1. Tim SAKIP terus berupaya melakukan koordinasi dengan Tim SIS untuk mengakselerasi perbaikan aplikasi SIMONEV;
2. Tim SAKIP juga berkoordinasi dengan Tim Inspektorat Wilayah I untuk memperjelas mekanisme evaluasi SAKIP Internal di tahun 2023.

# Rekomendasi

## *Tahun Berikutnya*

1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Tim SIS untuk berupaya mengembangkan aplikasi baru untuk penyusunan dokumen SAKIP karena aplikasi existing sulit dilakukan pengembangan;
2. Menyusun rencana tindak lanjut rekomendasi PANRB untuk perbaikan SAKIP BPS;
3. Pembinaan SAKIP untuk unit kerja pusat dan daerah.

# 3.1.3

## Capaian Kinerja

### *Tujuan Ketiga*

Tujuan ketiga Biro Perencanaan adalah "Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik". Pada tujuan ini terdapat dua sasaran strategis yaitu "Terlaksananya transformasi statistik BPS" dengan satu IKU "Jumlah laporan transformasi statistik" dan "Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS" dengan satu IKU "Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB".

Berdasarkan Tabel 8, capaian kinerja tujuan "Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik" dan sasaran strategis "Terlaksananya transformasi statistik BPS" untuk tahun 2023 adalah sebesar 100,00 persen. **Capaian kinerja untuk tujuan ketiga dengan sasaran strategis "Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS" untuk tahun 2023 adalah sebesar 103,06 persen.**

Tabel 8

**Capaian Kinerja Tujuan**  
**“Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik”**  
**Tahun 2022 s.d 2023**

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>T3. Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik</b>							
<b>SS3.1 Terlaksananya transformasi statistik BPS</b>							
Jumlah laporan transformasi statistik	Laporan	1,00	1,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%
<b>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis Pertama dari Tujuan Ketiga</b>				<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
<b>SS3.2 Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS</b>							
Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	80,00	79,81	99,76%	81,00	83,48	103,06%
<b>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis Kedua dari Tujuan Ketiga</b>				<b>99,76%</b>	<b>103,06%</b>		
<b>Capaian Kinerja Tujuan Ketiga</b>				<b>99,88%</b>	<b>101,53%</b>		

### a. Jumlah laporan transformasi statistik

Sasaran “Terlaksananya Transformasi Statistik BPS” merupakan sasaran yang baru di periode Renstra 2020-2024. Pada periode Renstra 2015-2020, indikator kegiatan transformasi statistik masih tergabung dalam indikator “Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi dan Statcap Cerdas yang Terbit Tepat Waktu” yang digunakan untuk mengukur sasaran “Terlaksananya Reformasi Birokrasi Aparatur BPS”. Penggunaan sasaran “Terlaksananya Transformasi Statistik BPS” pada periode Renstra 2020-2024 diharapkan dapat lebih menajamkan

output Biro Perencanaan mengingat pentingnya program Transformasi BPS sebagai booster pelaksanaan reformasi birokrasi. Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dimana pembiayaan program transformasi BPS berasal dari anggaran khusus yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dari APBN. Selama periode tersebut, beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan program transformasi yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup seluruh pilar transformasi, yaitu pilar transformasi statistik, pilar

ransformasi teknologi informasi (TI) serta pilar transformasi sumber daya manusia (SDM) dan organisasi.

Indikator “Jumlah laporan transformasi statistik” pada tahun 2023 ditargetkan sejumlah 1 (satu) laporan. Dari target tersebut dan berdasarkan realisasi jumlah laporan transformasi statistik yaitu sebanyak 1 (satu) laporan, maka **capaian kinerja Biro Perencanaan untuk indikator ini adalah sebesar 100,00 persen atau tercapai sesuai target.**

## Masalah/Kendala *yang Dihadapi*

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Tim Economy Wide Survey (EWS), sehingga supervisi pelaksanaan Focus Grup Discussion (FGD) Kuesioner EWS di 17 kabupaten/kota tidak dapat dikunjungi semua;
2. Pendataan EWS yang semula dijadwalkan pada triwulan-4, tidak jadi dilaksanakan karena kegiatan survei untuk perusahaan sudah banyak, dikhawatirkan menjadi responden burden;
3. Timeline pilot Bussiness Character Survey (BCS) Perluasan bergantung dari timeline ujicoba EWS;
4. Penyusunan kuesioner kognitif BCS Perluasan harus menunggu draft kuesioner BCS Perluasan final;
5. Padatnya pekerjaan anggota tim BCS sehingga sulit untuk mencari waktu melakukan koordinasi dan diskusi dengan tim dan PJK terkait;
6. Perlu penguatan tim internal BPS dalam rangka peningkatan kualitas dan percepatan progress penyusunan rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS);
7. Pada penyampaian Hasil EPSS, banyak email yang tidak terkirim ke alamat tujuan karena kendala blast email, sehingga perlu dikirim berkali-kali atau meminta alternatif alamat email.

# Solusi Mengatasi *Masalah/Kendala*

1. Supervisi pelaksanaan FGD kuesioner EWS tetap dilaksanakan namun tidak pada seluruh daerah pelaksanaan;
2. Pelaksanaan pendataan EWS dijadwalkan pada triwulan-1 2024;
3. Timeline piloting BCS Perluasan akan menyesuaikan dengan timeline uji coba EWS;
4. Menyelesaikan draft kuesioner BCS Perluasan agar penyusunan kuesioner kognitif BCS Perluasan dapat segera dilakukan;
5. Telah dilakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders untuk mendapatkan alternatif solusi terkait kendala dalam penyusunan rekomendasi EPSS;
6. Memperkuat koordinasi dalam tim kerja Transformasi Statistik.

# Rekomendasi *Tahun Berikutnya*

1. Melaksanakan rekap hasil FGD Kuesioner EWS;
2. Melaksanakan pendataan EWS pada triwulan-1 2024;
3. Pelaksanaan pilot BCS mengikuti rencana pendataan EWS dijadwalkan pada triwulan-1 2024;
4. Perlu dilakukan diskusi dengan Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) terkait yang akan dimulai pada awal tahun 2024;
5. Perlu anggota tim yang komitmen dan berdedikasi untuk fokus pada pelaksanaan BCS.

## b. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB

Indikator "Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB" pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 81,00 poin. Dari target tersebut dan berdasarkan nilai RB BPS Tahun 2023 yaitu sebesar 83,48 poin, maka capaian kinerja Biro Perencanaan untuk indikator ini adalah sebesar 103,06 persen.

Berdasarkan dari Hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kementerian PAN-RB atas penilaian implementasi Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS telah terdapat upaya untuk mewujudkan tata kelola reformasi birokrasi agar semakin baik, meskipun masih terdapat aspek-aspek yang masih perlu dilakukan perbaikan. Beberapa kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan di tahun 2023 khususnya untuk Sekretariat RB yang

berada di bawah Biro Perencanaan adalah sbb:

1. Penyempurnaan struktur tim RB BPS dan tata kelola pelaksanaan RB;
2. Penetapan Quick Wins BPS Tahun 2023;
3. Penyusunan Strategi Pelaksanaan RB BPS 2020-2024
4. Reviu Road Map RB BPS 2020-2024
5. Penyusunan Rencana Kerja RB BPS Tahun 2022
6. Persiapan dan Pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2022
7. Penyusunan Program Intervensi
8. Leadership Training yaitu Leading a National Statistics Office Workshop (LANSOW);
9. Program Capacity Building, Workshop, dan Knowledge Sharing;
10. Pembangunan Sistem Pengelolaan Manajemen Perubahan (SIPMANNER)

## Masalah/Kendala *yang Dihadapi*

1. Proses finalisasi rancangan Perka pembangunan agen perubahan membutuhkan waktu yang lama saat diriviu oleh Tim Hukum BPS;
2. Rendahnya pelaporan pelaksanaan renaksi agen perubahan melalui Sipmanner;
3. Penilaian evaluasi RB berbeda dengan tahun sebelumnya, sehingga membutuhkan koordinasi yang intens dengan PJK indeks messo RB;

# Solusi Mengatasi *Masalah/Kendala*

1. Tim Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan terus melakukan komunikasi yang intens dengan PIC Tim Hukum;
2. Menyusun surat permintaan laporan manajemen perubahan ke setiap unit kerja;
3. Mengundang beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) leading sektor untuk menjadi narasumber dalam penjelasan indeks mесо RB;
4. Melakukan konsolidasi dan intensifikasi pekerjaan.

# Rekomendasi *Tahun Berikutnya*

1. Memperkuat tata kelola Tim Kerja RB BPS;
2. Monitoring dan Evaluasi secara berkala dalam hal implementasi pelaksanaan program kerja RB;
3. Memperkuat lagi kerja sama dengan inspektorat dalam penguatan Zona Integritas di BPS Daerah;
4. Melakukan mapping tujuan dan target RB yang jelas sehingga distribusi waktu dan pembagian tim lebih merata.

# Solusi Mengatasi *Masalah/Kendala*

1. Tim Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan terus melakukan komunikasi yang intens dengan PIC Tim Hukum;
2. Menyusun surat permintaan laporan manajemen perubahan ke setiap unit kerja;
3. Mengundang beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) leading sektor untuk menjadi narasumber dalam penjelasan indeks mесо RB;
4. Melakukan konsolidasi dan intensifikasi pekerjaan.

# Rekomendasi *Tahun Berikutnya*

1. Memperkuat tata kelola Tim Kerja RB BPS;
2. Monitoring dan Evaluasi secara berkala dalam hal implementasi pelaksanaan program kerja RB;
3. Memperkuat lagi kerja sama dengan inspektorat dalam penguatan Zona Integritas di BPS Daerah;
4. Melakukan mapping tujuan dan target RB yang jelas sehingga distribusi waktu dan pembagian tim lebih merata.

# Perbandingan

## Capaian Kinerja Tahun 2019 s.d 2023

**D**alam kurun waktu lima tahun, capaian kinerja Biro Perencanaan terhadap total cukup fluktuatif. Realisasi capaian kinerja terendah ada pada tahun 2020 yaitu sebesar 98,60 persen. Hal ini juga dikarenakan tahun 2020 merupakan periode pertama dari Renstra 2020-2024 sehingga merupakan nilai baseline. Capaian kinerja tertinggi tercapai pada tahun 2023 yaitu sebesar 100,82 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Biro Perencanaan secara terus menerus berusaha meningkatkan performa dan kinerjanya dalam mencapai tujuan.

Pada periode 2020 s.d 2023, dapat dilihat pada Gambar 6, capaian kinerja Biro Perencanaan selalu mengalami peningkatan dimana pada periode awal Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan yaitu di tahun 2020, capaian kinerja Biro Perencanaan adalah sebesar 98,60 persen. Kecenderungan positif ini menunjukkan bahwa Biro Perencanaan selalu berusaha meningkatkan performanya setiap tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran inerja yang telah ditetapkan.

*Gambar 8*  
Capaian Kinerja  
Biro Perencanaan  
2019  
s.d 2023



# Prestasi dan Inovasi Tahun 2023

**P**ada tahun 2023, Biro Perencanaan mendapatkan penghargaan internal dari Kepala BPS atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan SPT Tahun 2022 di Lingkungan Badan Pusat Statistik.



*Gambar 9*

**Piagam Penghargaan Kepatuhan  
Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan**

Selain prestasi tersebut, Biro Perencanaan juga telah berkontribusi dalam inovasi di tingkat lembaga. Beberapa inovasi tersebut antara lain:

**1. Pembangunan aplikasi Back Office Seluruh Indonesia (BOS Selindo)**

Back Office Selindo (BOS) adalah system informasi manajemen yang terintegrasi dalam menyertai siklus APBN di lingkungan Badan Pusat Statistik. Terdiri dari modul Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pencatatan dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi, secara simultan di tingkat pusat dan daerah (517 satker).

**2. Penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Manajemen Perubahan (SIPMANNER)**

Sistem Informasi Pengelolaan Manajemen Perubahan (SIPMANNER) adalah sistem yang mengintegrasikan pengelolaan manajemen perubahan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian. SIPMANNER digunakan oleh Change Champion di unit kerja Eselon II BPS Pusat dan BPS Daerah untuk pengelolaan rencana kerja manajemen perubahan di unit kerja masing-masing. Aplikasi SIPMANNER terus dilakukan penyempurnaan menyesuaikan tata kelola manajemen perubahan serta perbaikan bug.

**3. Penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV)**

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV) adalah sistem informasi yang digunakan untuk pemantauan capaian kinerja di masing-masing unit kerja Eselon I, II, dan III. Pada tahun 2023 dilakukan penambahan fitur pemantauan target dan realisasi anggaran untuk menjawab rekomendasi Kementerian PAN&RB.

**4. Penyempurnaan aplikasi iPlan BPS**

Aplikasi iPlan adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu PJK dalam pengajuan usulan kegiatan dan anggaran untuk penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga (K/L). Pada tahun 2023, dilakukan penyempurnaan iPlan antara lain penambahan fitur untuk cetak laporan RAB dan TOR, penyesuaian rate SBM 2023, penyesuaian format output sesuai regulasi, dll.

# Realisasi Kinerja

*Berdasarkan Indikator Kinerja Utama*

*Tabel 9*

## Realisasi Kinerja Berdasarkan IKU Biro Perencanaan Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	2023			Realisasi	2023		
		Target				%Capaian Kinerja		
		Target Renstra 2023	Target PK 2023	Target Renstra 2024		Terhadap Target Renstra 2023	Terhadap Target PK 2023	Terhadap Target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	Persen	95,00	95,00	95,00	97,00	102,11%	102,11%	102,11%
Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	79,00	79,00	80,00	78,15	98,92%	98,92%	97,69%
Jumlah laporan transformasi statistik	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	81,00	81,00	82,00	83,48	103,06%	103,06%	101,80%

# Realisasi dan Efisiensi

## *Biro Perencanaan*

### *Tahun 2023*

**P**ada awal tahun sesuai SP DIPA-054.01.1.018576/2023, Biro Perencanaan menerima pagu sekitar Rp. 16,82 miliar dalam rupiah murni (RM). Anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan yang terbagi dalam 5 Rincian Output (RO). P

**Pagu paling besar dialokasikan untuk RO Layanan Reformasi Kinerja sebesar Rp. 13,05 miliar atau 77,59 persen dari total anggaran Biro Perencanaan.**

RO Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I dialokasikan sebesar Rp. 1,69 miliar (10,09 persen), RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp. 1,64 miliar (9,80 persen), RO Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I sebesar Rp. 239 juta (1,42 persen) dan RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp. 185 juta (1,10 persen). Sampai dengan kondisi 31 Desember 2023, BPS telah melakukan revisi DIPA sebanyak 13 kali. Perbandingan pagu awal dan akhir yang dikelola oleh Biro Perencanaan dapat dilihat pada Tabel 10.

*Tabel 10*

### Perbandingan Pagu Awal dan Pagu Akhir Biro Perencanaan Tahun 2023

No.	Program/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output (RO)	Pagu Awal	Pagu Akhir
(1)	(2)	(4)	(5)
	<b>054.01.WA Program Dukungan Manajemen</b>	<b>16.819.852.000</b>	<b>14.549.989.000</b>
	<b>2881 EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>16.819.852.000</b>	<b>14.549.989.000</b>
1	1A5 Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I	1.696.515.000	453.702.000
2	2A5 Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I	239.003.000	158.443.000
3	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.648.925.000	7.747.779.000
4	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	185.457.000	189.752.000
5	961 Layanan Reformasi Kinerja	13.049.952.000	6.000.313.000

RO Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I dialokasikan sebesar Rp. 1,69 miliar(10,09 persen), RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp. 1,64 miliar (9,80 persen), RO Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I sebesar Rp. 239 juta (1,42 persen) dan RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp. 185 juta (1,10 persen). Sampai dengan kondisi 31 Desember 2023, BPS telah melakukan revisi DIPA sebanyak 13 kali. Perbandingan pagu awal dan akhir yang dikelola oleh Biro Perencanaan dapat dilihat pada Tabel 10.

Penyerapan anggaran untuk KRO 2881.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal di tahun 2023 sebesar Rp. 12.595.579.833,- atau 86,57 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi penurunan persentase realisasi anggaran sebesar 8,85 poin. Realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis dan program disajikan pada Tabel 10. Berdasarkan Tabel 10, sasaran strategis "meningkatnya birokrasi yang akuntabel" memiliki persentase realisasi anggaran tertinggi yaitu 93,88 persen dan sasaran strategis "terlaksananya transformasi statistik BPS" memiliki persentase realisasi anggaran terendah yaitu 73,55 persen.

*Tabel 11*

## Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2023

Program (1)	Sasaran Strategis (2)	Pagu (3)	Realisasi (4)	Persentase (5)	
<b>Dukungan Manajemen</b>	SS.1.1	Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu	8.391.233.000	7.507.684.418	89,47%
	SS.2.1	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	158.443.000	148.742.112	93,88%
	SS.3.1	Terlaksananya transformasi statistik BPS	3.141.709.000	2.310.651.756	73,55%
	SS.3.2	Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS	2.858.604.000	2.628.501.547	91,95%
<b>Total</b>		<b>14.549.989.000</b>	<b>12.595.579.833</b>	<b>86,57%</b>	

Pada tahun 2023, Biro Perencanaan juga telah melakukan berbagai upaya efisiensi anggaran. Tabel 11 menunjukkan bahwa terdapat seluruh sasaran strategis Biro Perencanaan memiliki nilai capaian kinerja lebih tinggi dibanding realisasi anggaran yang menunjukkan adanya efisiensi anggaran pada keempat sasaran strategis tersebut.

Berdasarkan rata-rata sasaran, capaian kinerja Biro Perencanaan lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi anggaran yang menunjukkan adanya upaya efisiensi anggaran di tahun 2023.

*Tabel 12*

## Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, dan Nilai Efisiensi Biro Perencanaan Tahun 2023

Sasaran Strategis		Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Nilai Efisien (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
SS.1.1	Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu	101,05	89,47	50,29
SS.2.1	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	98,92	93,88	50,13
SS.3.1	Terlaksananya transformasi statistik BPS	100,00	73,55	50,66
SS.3.2	Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS	103,06	91,95	50,28
<b>Rata-rata Sasaran</b>		<b>100,76</b>	<b>86,57</b>	<b>50,35</b>

Upaya efisiensi yang dilakukan Biro Perencanaan selama tahun anggaran 2023 antara lain:

1. Kegiatan pembinaan seperti pembinaan SAKIP dan ZI dilakukan secara online.
2. Proses pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial seperti pelatihan dan refreshing Tim Penilai Badan dilakukan secara online.
3. Menghemat penggunaan listrik ketika istirahat dan waktu jam kerja selesai serta menghindari penggunaan listrik yang berlebihan, mematikan PC, Laptop dan lampu bila sudah tidak digunakan.
4. Penghematan dalam penggunaan kertas dan tinta printer.





# **Bab IV**

# **Penutup**

- Tinjauan Umum
- Tindak Lanjut

# Tinjauan *Umum*

**P**elaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan BPS tahun 2023 dapat dikatakan tercapai dengan baik yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 100,82 persen. Dari sisi anggaran, pagu Biro Perencanaan Tahun 2023 sebesar Rp.14,55 miliar. Realisasi anggaran Biro Perencanaan 12,59 miliar atau sebesar 86,57 persen. Capaian kinerja secara total pada sasaran strategis lebih tinggi dari persentase realisasi anggaran, dengan kata lain Biro Perencanaan telah melakukan efisiensi anggaran

dengan cukup baik dengan nilai efisiensi 50,35 persen. Upaya-upaya untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja perlu terus dilakukan oleh Biro Perencanaan BPS, seperti terus meningkatkan upaya untuk mendapatkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP oleh Kementerian PAN & RB yang lebih baik. Upaya-upaya tersebut bukan hanya sebatas untuk penilaian saja, tetapi diarahkan agar menjadi suatu budaya organisasi yang baik serta berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima kepada para pengguna data.

# Tindak *Lanjut*

**D**ari capaian kinerja yang sudah diraih Biro Perencanaan BPS Tahun 2023, tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk kedepannya yaitu:

1. Meningkatkan upaya untuk merealisasikan indikator sasaran strategis yang belum tercapai 100% yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB melalui penguatan pembinaan dan peningkatan koordinasi serta kolaborasi dengan penanggung jawab kegiatan selain Biro Perencanaan untuk penyusunan laporan yang terbit tepat waktu, penguatan dan implementasi SAKIP BPS.
2. Perlu melakukan penghitungan dan analisis kebutuhan anggaran yang lebih cermat serta menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti peraturan menteri keuangan sehingga alokasi anggaran BPS tidak terlalu overbudget maupun underbudget, misalnya ketentuan alokasi maupun pencairan gaji dan tunjangan.
3. Perlu koordinasi upaya perbaikan dengan semua stakeholder BPS untuk menindaklanjuti rekomendasi Kementerian PAN & RB atas penilaian reformasi birokrasi BPS dan SAKIP.
4. Perlu meningkatkan pelaksanaan langkah tindak lanjut hasil pengawasan/monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala baik bulanan, maupun triwulan sehingga realisasi penyerapan anggaran dapat sejalan dengan pencapaian kinerja.





# Lampiran

# Lampiran 1

## RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN TAHUN 2020-2024

<b>Instansi</b>	: <b>Biro Perencanaan BPS</b>
<b>Visi</b>	: Terwujudnya Sistem Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi serta Transformasi Statistik Badan Pusat Statistik yang Akuntabel
<b>Misi</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang berkesinambungan;</li> <li>Meningkatkan kualitas sistem penganggaran berbasis kinerja;</li> <li>Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kinerja yang akurat; dan</li> <li>Menyelenggarakan <i>Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics (Statcap-Cerdas)</i>.</li> </ol>

Tujuan (1)	Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Uraian (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Kebijakan (4)	Program (5)
<b>Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu</b>	Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu	1. Peningkatan sistem kerja antar Deputi, Bidang, dengan pendekatan kebijakan yang terarah dan mudah dipahami	Dukungan Manajemen
		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu	2. Meningkatnya penggunaan sistem aplikasi dalam monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran dalam mendukung akuntabilitas kinerja aparatur BPS	
<b>Pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS</b>	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan R	3. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	

Tujuan (1)	Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Uraian (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Kebijakan (4)	Program (5)
Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang	Terlaksananya transformasi statistik BPS	Jumlah laporan transformasi statistik	4. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif	
	Terlaksananya reformasi birokrasi	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB		

# Lampiran 2

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BIRO PERENCANAAN  
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. M. Nashrul Wajdi SST., M.Si.  
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Atqo Mardiyanto M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Utama  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. Atqo Mardiyanto M.Si.  
NIP. 19640508 198702 1 002

Jakarta, 14 Januari 2023  
Pihak Pertama

Dr. M. Nashrul Wajdi SST., M.Si.  
NIP. 19791213 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BIRO PERENCANAAN

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu			
Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu (%)	Persen	100
	Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	Persen	95
Tujuan 2. Meningkatkan pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS			
Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	79
Tujuan 3. Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik			
Terlaksananya transformasi statistik BPS	Jumlah laporan transformasi statistik	Dokumen	1
Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	81

**Kegiatan**

**Anggaran**

Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran

Rp. 16.819.852.000,-

Pihak Kedua

Jakarta, 14 Januari 2023  
Pihak Pertama



Ir. Atgo Mardiyanto M.Si.  
NIP. 19640508 198702 1 002



Dr. M. Nashrul Wajdi SST., M.Si.  
NIP. 19791213 200012 1 002

# Lampiran 3

**Tabel Analisis Capaian Kinerja Pertriwulanan 2023  
Biro Perencanaan**

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan I			Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif			
Tujuan 1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu						
SS1.1. Meningkatkan perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu						
1. Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu	Persen	100	10,17	<p>Penyusunan Rencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam penyusunan Laporan Reviu Angka Dasar RKA TA 2024 Program PPIS (N+2), tidak ada sistem backup pada aplikasi SAKTI sehingga rawan untuk mengulang inputan kembali</li> <li>Dalam penyusunan proposal inisiatif baru, substansi yang dituliskan cenderung terbatas karena PIK dalam melakukan entri usulan pada aplikasi IPLAN tidal lengkap</li> <li>Dalam penyusunan Rancangan Angka Dasar Dukman N+1, kebijakan N+1 terkait anggaran dan kegiatan masih belum bs diperoleh</li> <li>KAK usulan dan dokumen studi kelayakan SBSN harus mencakup seluruh kebutuhan sarpras: pembangunan, meubelair, penataan halaman, dan pagar. Namun, kebijakan pimpinan pelaksanaan pembangunan terlebih dahulu untuk pengadaan lainnya di satker tersebut menyusul.</li> <li>Dalam penyusunan Proposal Rencana Target PNBPs N+1, rencana Target PNBPs Fungsional sering tidak tercapai</li> <li>Dalam penyusunan SBML, tim DJA masih belum memahami proses bisnis kegiatan statistik di BPS sehingga berpotensi tidak seluruh usulan disetujui</li> <li>Dalam Penyusunan Perka BPS No.1 Tahun 2023, proses penyusunan dan penetapan sedikit terlambat dari target yang ditetapkan</li> </ol> <p>Penyusunan Akuntabilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nilai SAKIP dan RB lembaga baru rilis di bulan Maret 2023 sehingga LAKIN 2022 harus disesuaikan kembali</li> <li>Narasi LAKIP Sestama dan Pusat, perlu menunggu data dan narasi dari SM terkait</li> <li>Adanya perubahan tim SAKIP khususnya di BPS Pusat membutuhkan knowledge sharing</li> <li>Usulan Tim SAKIP KTIP mengalami perubahan sehingga SK perlu disesuaikan</li> </ol> <p>Monitoring Program</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aplikasi Laporan Pekerjaan Pimpinan, sering mengalami server error sehingga proses input laporan menjadi</li> </ol>	<p>Penyusunan Rencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi lebih intensif dengan tim DJA sebagai pengampu aplikasi SAKTI</li> <li>Melakukan diskusi dengan PIK terkait sekaligus evaluasi mengenai urgensi kegiatan yang akan diusulkan. Selain itu, pimpinan menekankan ke PIK untuk melakukan integrasi survei mengingat jumlah survei di BPS yang semakin banyak tiap tahunnya</li> <li>Evaluasi anggaran dan kegiatan dengan SM sebagai ajang komunikasi terbuka terkait kebutuhan anggaran N+1 yang realistsis</li> <li>Karena anggaran SBSN mengikat hanya di satker yang diusulkan, maka nilai anggaran untuk pengadaan meubelair menggunakan optimalisasi dari pembangunan gedung, pagar, dan penataan halaman</li> <li>Perlu komunikasi dan diskusi dengan SM pengampu PNBPs Fungsional</li> <li>Diskusi intensif dengan tim DJA</li> <li>Diskusi intensif dengan tim terkait yang mengampu pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran termasuk dengan biro humas dan hukum</li> </ol> <p>Penyusunan Akuntabilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Revisi LAKIN Sestama dan Biro Perencanaan menyesuaikan nilai terbaru</li> <li>Koordinasi dengan SM untuk pengisian narasi LAKIN</li> <li>Telah ditetapkan SK Tim SAKIP Lembaga dan BPS Pusat</li> <li>Mengajukan perbaikan draft SK menyesuaikan tim yang terbaru</li> <li>Mengadakan pembinaan Tim SAKIP BPS Pusat</li> </ol> <p>Monitoring Program</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dengan programmer (Direktorat SIS) dari aplikasi untuk penanganan yang cepat</li> <li>Melakukan koordinasi ke Kementerian Keuangan selaku pengelola aplikasi melalui HaiDIPB</li> </ol>	<p>Penyusunan Rencana</p> <p>Mempertimbangkan aktivitas inisiatif baru untuk dialokasikan anggarannya sesuai dengan ketersediaan anggaran</p> <p>Penyusunan Akuntabilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan SAKIP untuk BPS Daerah</li> <li>Penyesuaian fitur SIMONEV</li> <li>Penyusunan LAKIN Pusat Tw I 2023</li> <li>Upload dokumen LAKIN ke website PPID</li> </ol> <p>Monitoring Program</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengecekan secara rutin dan melakukan koordinasi ke Direktorat SIS dalam rangka perbaikan maupun update database melalui programmer agar proses input laporan tidak terkendala</li> <li>Melakukan koordinasi dengan BPS Provinsi Jawa Timur terkait respon perbaikan data dari DJPB</li> </ol> <p>Evaluasi dan Pelaporan Program</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring secara rutin dan terus berkoordinasi dengan PIC SMART Provinsi</li> <li>Melakukan monitoring secara rutin dan terus berkoordinasi dengan PIC e-monev di Bappenas</li> <li>Melakukan monitoring secara rutin dan terus berkoordinasi dengan PIC e-monev Provinsi</li> </ol>

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan I			Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif			
				<p>terkendala</p> <p>2. Data update terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dalam OMSPAN masih error (Capaian output) BPS Provinsi Jawa Timur masih nol, meskipun satker telah melakukan input pada Aplikasi SMART</p> <p>Evaluasi dan Pelaporan Program</p> <p>1. Masih terdapat data anomali dalam pengisian capaian output satker pada aplikasi SMART</p> <p>2. Pagu, komponen, dan RO pada aplikasi e-monev belum sama dengan kondisi terakhir seluruh satker, sehingga terkendala dalam penginputan realisasi anggaran dan capaian komponen dan RO</p> <p>3. Masih terdapat pengisian data oleh satker pada aplikasi e-monev yang belum sesuai ketentuan</p>	<p>Evaluasi dan Pelaporan Program</p> <p>1. Melakukan koordinasi dengan PIC SMART di Provinsi untuk melakukan koreksi pengisian capaian output agar tidak ada lagi data anomali</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan PIC aplikasi e-monev di Bappenas untuk mengupdate pagu, komponen, dan RO sesuai kondisi terakhir dengan mengirimkan adk serta data komponen yang sudah tidak ada lagi di POK tetapi masih muncul di aplikasi e-monev</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan PIC e-monev di Provinsi untuk melakukan koreksi pengisian capaian komponen/RO agar sesuai ketentuan</p>	
2. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	Persen	95	14,54	<p>1. Adanya beberapa kegiatan dibatalkan menyebabkan perubahan pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan</p> <p>2. Adanya anggaran yang diblokir terutama anggaran sarana dan prasarana terkait pembangunan gedung baru yang membutuhkan izin prinsip pembangunan gedung dari presiden</p> <p>3. RKBMN-P baru terbit bulan Maret sehingga pelaksanaan anggaran baru dapat dilakukan dan harus ditindaklanjuti dengan revisi DIPA untuk pembukaan blokirnya</p>	<p>1. PJK segera mengajukan usulan anggaran agar PIC Anggaran segera menyusun dasar hitung anggaran baru.</p> <p>2. PIC Anggaran segera memfinalisasi alokasi anggaran baru setelah adanya beberapa kegiatan yang dibatalkan agar pelaksanaan anggaran dapat segera berjalan sesuai perencanaan</p> <p>3. Melakukan revisi DIPA II untuk menindaklanjuti alokasi anggaran baru karena adanya beberapa kegiatan yang dibatalkan</p> <p>4. Melakukan koordinasi kepada pihak terkait dalam hal ini Setkab untuk memantau proses dokumen izin prinsip</p>	<p>Melakukan revisi DIPA III untuk buka blokir pada bulan April dan meminta Satker yang memiliki anggaran yang dalam proses pelaksanaannya membutuhkan RKBMN-P untuk mempercepat proses pelaksanaan anggaran</p>
<p>Tujuan 2. Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS</p> <p>552.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel</p>						
1. Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	79	0	<p>1. Hasil nilai SAKIP 2022 baru rilis di bulan Maret 2023 sehingga rencana aksi untuk menjawab rekomendasi KemenPAN RB baru bisa dilakukan di Tw II 2023</p> <p>2. Banyak pergantian anggota tim SAKIP Pusat 2023 dan perlu dilakukan knowledge sharing terkait SAKIP</p>	<p>1. Telah ditetapkan SK Tim SAKIP Lembaga dan BPS Pusat</p> <p>2. Pembinaan tim SAKIP BPS Pusat sebagai sarana knowledge sharing</p> <p>3. Melakukan kompresi file LAKIN agar dapat diupload di ESR KemenPANRB</p>	<p>1. Penyusunan rencana aksi untuk menjawab rekomendasi LHE SAKIP 2022</p> <p>2. Berkoordinasi dengan SIS untuk mengakselerasi pengembangan SIMONEV BPS</p>

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan I					
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
				3. SDM programmer Simonev terbatas (1 orang) sehingga proses pengembangan SIMONEV terkendala 4. Keterbatasan file yang dapat di upload di E-Sakip Reviu KempanRB		
Tujuan 3. Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik						
SS3.1. Terlaksananya transformasi statistik BPS						
1. Jumlah laporan transformasi statistik	Laporan	1	0	1. Kesibukan anggota tim integrasi statistik menyebabkan terlambatnya beberapa rangkaian kegiatan yang seharusnya sudah harus mulai dilaksanakan. 2. Pengecekan surat rekomendasi EPSS belum selesai dilaksanakan karena jumlah personil yang terbatas dan memiliki kesibukan lain. 3. Koordinasi tim EWS masih sulit dilakukan karena personil yang terlibat juga menjadi anggota tim di kegiatan-kegiatan BPS strategis lainnya.	1. Melakukan rangkaian kegiatan yang bisa dikerjakan oleh Tim Transformasi Statistik, seperti: menyusun draft kuesioner perluasan BCS berdasarkan hasil pemetaan 3 jenis kuesioner BCS 2. Melibatkan Tim Penjaminan Kualitas dari DAPS dan sebagian TPB dari Biroren untuk membantu melakukan pengecekan surat rekomendasi EPSS 3. Koordinasi secara online dilakukan oleh sebagian anggota tim EWS	1. Mengadakan diskusi dengan SM terkait draft kuesioner perluasan BCS 2. Memintakan ttd Kepala BPS untuk surat rekomendasi sebelum disampaikan ke K/L atau Pemda 3. Mengadakan pertemuan dengan anggota Tim EWS untuk membahas kelanjutan kegiatan EWS
SS3.2. Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS						
1. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	B1	0	1. Belum dapat melaksanakan Initial Meeting RB sebagai kesepakatan dalam melaksanakan program kerja tahunan RB 2. Komposisi Tim Pelaksana RB masih belum final karena masih ada usulan untuk penambahan dan pergantian personil 3. Pelaksanaan Workshop CM ditunda karena masih menunggu hasil dari pelaksanaan Initial Meeting Reformasi Birokrasi BPS. Karena salah satu tujuan workshop CM adalah untuk menginternalisasikan program kerja RB kepada para Agen Perubahan (Change Champion) dan akan diteruskan di unit kerja masing-masing. 4. Pelaksanaan SBO yang direncanakan dilaksanakan pada 10-14 April 2023, kemungkinan akan disesuaikan pelaksanaannya menjadi bulan Mei 2023, karena keterlambatan dalam penyusunan instrumen (finalisasi kuesioner SBO).	1. Sudah mengagendakan kegiatan Initial Meeting RB di awal April 2. Mengirim surat konfirmasi komposisi CTO-PMO kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 3. Pelaksanaan Workshop CM akan diadakan pada bulan Juli 2023 karena terdapatnya kegiatan prioritas BPS pada Mei-Juni (ST2023 dan FKP Regsosek). 4. Finalisasi seluruh instrumen SBO	1. Melaksanakan Initial Meeting RB di Bulan April 2. Membuat SK Tim Pelaksana RB tahun 2023 3. Melaksanakan Internalisasi program kerja RB kepada para Change Champion pada saat Coffee Morning CM bulanan. 4. Akan mempercepat proses pembuatan esurvey hingga ujicoba, agar pelaksanaan SBO tidak mundur terlalu jauh dari waktu yang sudah dijadwalkan.

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan I			Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif			
				terkendala 2. Data update terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dalam OMSPAN masih error (Capaian output) BPS Provinsi Jawa Timur masih nol, meskipun satker telah melakukan input pada Aplikasi SMART  Evaluasi dan Pelaporan Program 1. Masih terdapat data anomali dalam pengisian capaian output satker pada aplikasi SMART 2. Pagu, komponen, dan RO pada aplikasi e-monev belum sama dengan kondisi terakhir seluruh satker, sehingga terkendala dalam penginputan realisasi anggaran dan capaian komponen dan RO 3. Masih terdapat pengisian data oleh satker pada aplikasi e-monev yang belum sesuai ketentuan	Evaluasi dan Pelaporan Program 1. Melakukan koordinasi dengan PIC SMART di Provinsi untuk melakukan koreksi pengisian capaian output agar tidak ada lagi data anomali 2. Melakukan koordinasi dengan PIC aplikasi e-monev di Bappenas untuk mengupdate pagu, komponen, dan RO sesuai kondisi terakhir dengan mengirimkan adk serta data komponen yang sudah tidak ada lagi di POK tetapi masih muncul di aplikasi e-monev 3. Melakukan koordinasi dengan PIC e-monev di Provinsi untuk melakukan koreksi pengisian capaian komponen/RO agar sesuai ketentuan	
2. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	Persen	95	14,54	1. Adanya beberapa kegiatan dibatalkan menyebabkan perubahan pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan 2. Adanya anggaran yang diblokir terutama anggaran sarana dan prasarana terkait pembangunan gedung baru yang membutuhkan izin prinsip pembangunan gedung dari presiden 3. RKBMN-P baru terbit bulan Maret sehingga pelaksanaan anggaran baru dapat dilakukan dan harus ditindaklanjuti dengan revisi DIPA untuk pembekuan blokirnya	1. PIK segera mengajukan usulan anggaran agar PIC Anggaran segera menyusun dasar hitung anggaran baru. 2. PIC Anggaran segera memfinalisasi alokasi anggaran baru setelah adanya beberapa kegiatan yang dibatalkan agar pelaksanaan anggaran dapat segera berjalan sesuai perencanaan 3. Melakukan revisi DIPA II untuk menindaklanjuti alokasi anggaran baru karena adanya beberapa kegiatan yang dibatalkan 4. Melakukan koordinasi kepada pihak terkait dalam hal ini Setkab untuk memantau proses dokumen izin prinsip	Melakukan revisi DIPA III untuk buka blokir pada bulan April dan meminta Satker yang memiliki anggaran yang dalam proses pelaksanaannya membutuhkan RKBMN-P untuk mempercepat proses pelaksanaan anggaran
Tujuan 2. Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS						
SS2.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel						
1. Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	79	0	1. Hasil nilai SAKIP 2022 baru rilis di bulan Maret 2023 sehingga rencana aksi untuk menjawab rekomendasi KemenPAN RB baru bisa dilakukan di Tw II 2023 2. Banyak pergantian anggota tim SAKIP Pusat 2023 dan perlu dilakukan knowledge sharing terkait SAKIP	1. Telah ditetapkan SK Tim SAKIP Lembaga dan BPS Pusat 2. Pembinaan tim SAKIP BPS Pusat sebagai sarana knowledge sharing 3. Melakukan kompresi file LAKIN agar dapat diupload di ESR KemenPANRB	1. Penyusunan rencana aksi untuk menjawab rekomendasi LNE SAKIP 2022 2. Berkoordinasi dengan SIS untuk akselerasi pengembangan SIMONEV BPS

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan II				Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif				
Tujuan 1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu							
SS1.1. Meningkatkan perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu							
1. Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu	Persen	100	18,02	<p>Penyusunan Rencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan evaluasi usulan RKA TA 2024 berubah-ubah</li> <li>Perubahan proses bisnis dan alokasi anggaran menyebabkan perubahan Perka Masterplan dan Network Planning dilakukan beberapa kali</li> <li>Jadwal kegiatan yang diisikan oleh PJK pada aplikasi IPLAN tidak sesuai dengan real pelaksanaan di lapangan (pada tahun berjalan)</li> <li>Kebijakan N+1 terkait anggaran dan kegiatan masih berupa oncar-oncar sedangkan nilai pagu yang diperoleh pada saat indikatif tidak bisa diestimasi sebelumnya.</li> <li>Untuk SBKK masih menunggu surat pemberitahuan dari DIA</li> </ol> <p>Penyusunan Akuntabilitas</p> <p>Proses validasi FRA TW I dari Unit Kerja mengalami keterlambatan karena anggota tim SAKIP Unit Kerja banyak yang masih baru sehingga memerlukan waktu pendampingan ekstra bagi setiap Unit Kerja.</p> <p>Monitoring Program</p> <p>Masih ada beberapa Provinsi yang terlambat mengirimkan laporan bulanan atau data laporannya belum sesuai</p> <p>Evaluasi dan Pelaporan Program</p> <p>Verifikasi pelaporan data e-monev triwulan I 2023 di bulan Mei belum 100%</p>	<p>Penyusunan Rencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Konfirmasi dan memastikan ke pimpinan terkait dengan kebijakan yang ditetapkan</li> <li>Menyusun matriks perubahan Masterplan dan Network Planning Regsosek dan ST2023 yang mengakomodir keseluruhan perubahan sebagai dasar revidi Perka NWP yang sebelumnya</li> <li>Konfirmasi ulang ke PJK terkait dengan jadwal kegiatan tersebut yang lebih detail</li> <li>Konfirmasi ulang untuk mengevaluasi anggaran dan kegiatan dengan PJK</li> </ol> <p>Penyusunan Akuntabilitas</p> <p>Tim SAKIP membagi beban kerja kepada seluruh anggota yang bertanggungjawab untuk monitoring FRA Unit Kerja agar lebih cepat dalam proses validasi fra unit kerja</p> <p>Monitoring Program</p> <p>Melakukan monitoring, konfirmasi dan reminder kepada PIC BPS Provinsi</p> <p>Evaluasi dan Pelaporan Program</p> <p>Melakukan koordinasi dengan PIC e-monev di BPS Provinsi untuk melakukan pelaporan data pada aplikasi e-monev Bappenas</p>	<p>Penyusunan Rencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan yang telah final selanjutnya diterapkan pada proses penyusunan RKA TA 2024</li> <li>Matriks perubahan NWP dan draft perka NWP yang final dikirimkan ke Bagian Hukum untuk proses harmonisasi</li> <li>Menyusun dasar hitung sesuai dengan ketersediaan anggaran untuk dikonfirmasi ke PJK</li> </ol> <p>Penyusunan Akuntabilitas</p> <p>Melakukan monitoring dengan tetap membagi tugas ke seluruh anggota yang bertanggungjawab untuk monitoring FRA Unit Kerja</p> <p>Monitoring Program</p> <p>Terus Melakukan koordinasi dan reminder terkait pengumpulan data supporting penyusunan laporan bulanan ke PIC BPS Provinsi</p> <p>Evaluasi dan Pelaporan Program</p> <p>Melakukan monitoring secara rutin dan terus berkoordinasi dengan PIC e-monev di BPS Provinsi</p>	
2. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	Persen	95	42,13	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan realisasi anggaran antara SAKTI dengan Back Office Selindo</li> <li>Adanya potensi sisa anggaran Regsosek karena perubahan probis pada PJK terkait</li> <li>Adanya pembatalan pembelian tanah gedung kantor Kab Bukittinggi karena tidak tersedianya tanah dengan pagu tersedia</li> <li>Adanya potensi sisa anggaran modal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat bulanan evaluasi capaian anggaran untuk memonitoring capaian anggaran dan mengetahui kendala atas capaian anggaran</li> <li>PIC untuk melakukan realokasi anggaran untuk optimalisasi potensi sisa anggaran</li> <li>Melakukan revisi DIPA IV untuk menindaklanjuti alokasi anggaran baru karena adanya beberapa kegiatan yang harus direalokasi</li> </ol>	<p>Melakukan revisi DIPA IV untuk realokasi anggaran pada bulan Juni sehingga mempercepat proses pelaksanaan anggaran</p>	
Tujuan 2. Meningkatkan pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS							
SS2.1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel							
1. Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	79	0	Koordinasi dengan SIS sudah dilakukan namun implementasinya masih terhambat karena programmer yang ditugaskan hanya satu orang, dan	Mengusulkan tambahan orang/programmer kepada Direktorat SIS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan bukti dukung tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP 2022</li> <li>Berkoordinasi dengan SIS untuk mengakselerasi</li> </ol>	

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan II					
	Satuan	TARGET Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
					akhir oleh pimpinan untuk dapat ditetapkan menjadi Perka	

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan III					
	Satuan	TARGET Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut

Tujuan 1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu						
551.1. Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu						
1. Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang tepat waktu	Persen	100	22,39	<p>Tim Penyusunan Rencana: Ada 1 output yang direncanakan selesai di triwulan 3, yaitu Sistem Aplikasi IPan Modul Masterplan dan Modul PNBPN yang siap digunakan. Aplikasi IPan Modul Masterplan menampung seluruh usulan sarpras BPS, namun belum ada batasan sehingga usulan menjadi tidak terhingga. Oleh karenanya, diperlukan arahan pimpinan, khususnya terkait batasan ini. Namun karena belum ada arahan lebih lanjut dari pimpinan terkait Perka Masterplan, maka diundur hingga triwulan IV 2023.</p> <p>Tim Penyusunan Akuntabilitas Data untuk penyusunan LAKIN Triwulan Unit Kerja Pusat masuk berdekatan dengan waktu deadline, sehingga jadwal penyusunan LAKIN menjadi pendek</p> <p>Tim Monitoring Program 1. Pemasukan data pengadaan barang dan jasa dari daerah, masih ada satker yang tidak melakukan pengiriman email tepat waktu 2. Aplikasi Laporan Pekerjaan pimpinan terdapat pesan error pada saat user akan melakukan download berkas untuk di tandatangani oleh pimpinan 3. Pada saat akhir bulan kadang terkendala untuk download data pada aplikasi OMSPAN Kemenkeu</p> <p>Tim Evaluasi dan Pelaporan Program 1. Verifikasi pelaporan data e-money triwulan II 2023 baru dapat dilakukan di batas akhir masa verifikasi, karena masih terdapat satker yang belum melakukan pelaporan data s.d triwulan II 2. Masih terdapat data anomali dalam pengisian capaian output satker pada aplikasi SMART</p>	<p>Tim Penyusunan Rencana Masterplan roadmap sarpras sedang disusun dan minggu pertama November akan dimintakan daerah untuk entry lanjutan terkait item roadmap sarpras khusus TA 2025</p> <p>Tim Penyusunan Akuntabilitas Koordinasi dengan tim SAKIP unit kerja pusat untuk mengakselerasi pemasukan data SAKIP Unit kerja pusat</p> <p>Tim Monitoring Program 1. Melakukan Reminder dan koordinasi dengan PIC di daerah untuk pemenuhan kebutuhan data penyusunan Laporan Bulanan 2. Melakukan Koordinasi dengan direktoray SIS untuk perbaikan/pengembangan aplikasi Laporan Pekerjaan Pimpinan 3. Melakukan penarikan data di beberapa periode data, sebagai backup data laporan bulanan</p> <p>Tim Evaluasi dan Pelaporan Program 1. Melakukan monitoring, reminder, dan koordinasi dengan PIC e-money di BPS Provinsi untuk melakukan pelaporan data s.d triwulan II pada aplikasi e-money Bappenas 2. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian output satker, yang kemudian satker melakukan perbaikan capaian output</p>	<p>Tim Penyusunan Rencana Berkoordinasi dengan pimpinan supaya bisa segera memperoleh arahan final dalam penyusunan Perka Masterplan</p> <p>Tim Penyusunan Akuntabilitas Refreshing penyusunan Lakin unit kerja</p> <p>Tim Monitoring Program Melakukan koordinasi dengan SIS terhadap error aplikasi Laporan pekerjaan pimpinan, apakah akan dilakukan perbaikan atau pembangunan aplikasi baru</p> <p>Tim Evaluasi dan Pelaporan Program 1. Terus melakukan monitoring dan reminder secara rutin agar pelaporan data dapat dilakukan setiap bulan, tidak dilakukan per triwulan 2. Terus melakukan monitoring dan evaluasi capaian output satker agar lebih sesuai ketentuan</p>

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan III					
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
2. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	Persen	95	73,43	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa kontrak besar termin pembayarannya di triwulan III dan IV.</li> <li>2. Pengajuan Kerjasama dengan Kemenkop UMK dalam rangka Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM TA 2023 dengan nilai total penerimaan sebesar Rp.330.986.384.000,-</li> <li>3. Realokasi anggaran ST2023 dari BPS Pusat ke BPS Provinsi;</li> <li>4. Realokasi anggaran belanja pegawai dan revisi antar program dalam rangka pemenuhan belanja pegawai (dari sisa anggaran regsosek);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran kontrak sesuai termin pengadaaan</li> <li>2. Solusi kendala 2-4 dilakukan Revisi Dipa VI</li> </ol>	Menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan melakukan revisi POK dan Revisi DIPA jika diperlukan
Tujuan 2. Meningkatkan pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS						
SS2.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel						
1. Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	79	0	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terdapat kekurangan dokumen untuk tindak lanjut rekomendasi dalam rangka evaluasi SAKIP lembaga</li> <li>2. Mekanisme pendalaman tematik kemiskinan belum jelas karena baru dilaksanakan di tahun 2023</li> <li>3. Aplikasi SIMONEV masih dalam proses penyempurnaan</li> <li>4. Dokumen SAKIP di ESR masih belum sesuai kondisi terbaru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan tim-tim kerja yang bertanggung jawab terhadap tindak lanjut rekomendasi Kemempn RB</li> <li>2. Berkoordinasi dengan tim Deputi Bidang Statistik Sosial untuk proses persiapan dan pelaksanaan evaluasi SAKIP Tematik Kemiskinan 2023</li> <li>3. Koordinasi dengan SIS untuk segera menyelesaikan update fitur SIMONEV</li> <li>4. Menyiapkan dokumen rencana pengembangan SIMONEV baru dengan tim SIS</li> <li>5. Menyurati BPS Daerah untuk melakukan update dokumen SAKIP di ESR</li> <li>6. Melakukan upload ulang dokumen SAKIP unit kerja pusat di ESR</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan tim PANRB untuk proses evaluasi SAKIP Lembaga</li> <li>2. Berkoordinasi dengan tim SIS dan Tim SDM untuk pengembangan SIMONEV dan Integrasi SIMONEV dengan Kip App</li> <li>3. Penyiapan rencana pengembangan SIMONEV</li> <li>4. Melakukan pembinaan ke unit kerja BPS daerah untuk meningkatkan pemahaman terkait SAKIP</li> </ol>
Tujuan 3. Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik						
SS3.1. Terlaksananya transformasi statistik BPS						
1. Jumlah laporan transformasi statistik	Laporan	1	0	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan pembahasan terkait penilaian EPSS bagi BPS dalam rangka memenuhi evaluasi RB di BPS</li> <li>2. Perlu penguatan tim internal BPS dalam rangka peningkatan kualitas dan percepatan progress penyusunan rekomendasi</li> <li>3. Rencana untuk menginternalisasi Seluruh Eselon II yang terlibat dalam EWS belum dapat dilakukan karena kesibukan Pimpinan</li> <li>4. Kesibukan tim EWS membuat beberapa rencana EWS di bulan Agustus harus tertunda</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan diskusi terkait penilaian EPSS bagi BPS oleh Bidang Teknis EPSS dan melaporkannya kepada Penasihat EPSS untuk mendapatkan feedback</li> <li>2. a. Dilakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders untuk mendapatkan alternatif solusi terkait kendala dalam penyusunan rekomendasi b. Melakukan monitoring secara intensif untuk memantau progress penyusunan rekomendasi hasil EPSS</li> <li>3. Melakukan diskusi informal dengan Eselon II</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2. Peningkatan koordinasi dengan tim pelaksana dan TPB, baik pusat dan daerah serta pemantauan agar penyusunan surat rekomendasi dapat terselesaikan sesuai timeline</li> <li>3. -</li> <li>4. SK Tim sudah mendapat persetujuan Ka Biro Perencanaan dan Ka Biro Humas Hukum untuk selanjutnya di tandatangani oleh Ka BPS.</li> </ol>

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan III					
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
				5. Jadwal pencacehan yang semula dijadwalkan awal Oktober tidak dapat terealisasi karena beberapa daerah sampel sedang melaksanakan PL-UMKM sehingga tidak memungkinkan di awal Oktober. 6. Padatnya pekerjaan anggota tim BCS, sehingga sulit untuk mencari waktu yang tepat melakukan koordinasi dan diskusi	4. - Melakukan reschedule pelaksanaan pencacehan. 5. Rapat koordinasi terkait pemetaan variabel draft kuesioner BCS dengan SM Distribusi telah dilakukan	5. Telah disusun Jadwal/Timeline untuk Pilot EWS dimana pelaksanaan lapangan pada akhir oktober. 6. Perluasan Implementasi Survei Karakteristik Usaha 2023, akan dilakukan pemeriksaan dan pengelompokan terkait hasil pemetaan kuesioner SE2016, serta akan disusun kuesioner kognitif untuk Perluasan BCS
SS3.2. Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS						
3. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	B1	0	1. Draf program kerja dan rencana aksi RB 2023 belum difinalisasi karena menunggu arahan pimpinan. 2. Format laporan evaluasi ex-ante dan on going triwulanan yang belum jelas 3. Sulitnya koordinasi di tim RB karena jadwal RB dan pekerjaan yang berisikan 4. Pelaksanaan rivi akhir serta penetapan untuk Regulasi Perka nilai-nilai dasar pegawai BPS (BerAKHLAK) masih membutuhkan waktu yang tepat untuk dapat diajukan kepada Pimpinan BPS. 5. Belum menyusun konsep dan instrumen untuk penilaian Agen Perubahan (Change Champion) terbaik tahun 2023	1. Dokumen Roadmap dan rencana aksi sedang dilaksanakan rivi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi/APIP Internal 2. Penyusunan draft laporan evaluasi ex-ante dan on-going pelaksanaan RB 3. Melaksanakan rapat RB secara online 4. Menyusun bahan internalisasi Budaya Kerja BerAKHLAK Pegawai BPS 5. -	1. Melakukan finalisasi Roadmap RB dan rencana aksi RB hingga dilakukan pengesahan oleh Pimpinan 2. Menyusun Laporan Ex-Ante dan Laporan On Going pelaksanaan RB tahun 2023 3. Melaksanakan Rapat Finalisasi hasil monitoring dan evaluasi oleh APIP 4. Mengajukan pengesahan Regulasi Perka nilai-nilai dasar pegawai BPS kepada Pimpinan 5. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen perubahan di Unit Kerja

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan IV					
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
Tujuan 1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu						
SS1.1. Meningkatkan perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu						
1. Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu	Persen	100	100	Penyusunan Rencana 1. Jadwal Ranwal yang dimundurkan oleh Bappenas 2. Metodologi SE2026 (jumlah sampel dan petugas) yang akan dicantumkan dalam Dokumen Perka Masterplan dan Network Planning SE2026 masih dalam tahap perbaikan oleh Tim Metodologi 3. Penyusunan Standar Kebutuhan Sarpras Satker (SKSS) untuk tanah kantor, gedung kantor, tanah dan bangunan rumah dinas jabatan, kendaraan dinas jabatan, layanan listrik, layanan air, layanan internet, meja dan kursi pegawai, serta	Penyusunan Rencana 1. Diskusi dengan Tim Metodologi dan juga Tim Hukum 2. Evaluasi SKSS di 18 provinsi 3. Selalu melakukan update kebijakan pimpinan 4. Melaksanakan sosialisasi penyusunan renstra dan penjenjangan kinerja dengan menghadirkan narsum dari Bappenas dan Kemenpan RB  Penyusunan Akuntabilitas 1. Koordinasi dengan tim SAKIP unit kerja pusat untuk mengakselerasi pemasukan data SAKIP Unit kerja pusat	Penyusunan Rencana 1. Menunggu angka Ranwal Final (jadwal dari Bappenas mundur menjadi pertengahan Januari) 2. Menunggu perbaikan metodologi dari Tim Metodologi 3. Melengkapi evaluasi SKSS 4. Perbaikan draft Perka berdasarkan hasil harmonisasi dengan Tim Hukum 5. Mengusulkan menggunakan konsultan dalam penyusunan renstra

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan IV					
	Satu an	Targ et Seta hun	Real isasi Kum ulatif	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
Tujuan 2. Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS						
SS2.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel						
1. Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	79	78,15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi SIMONEV belum mengakomodir fitur analisis efisiensi anggaran dan masih error utk dashboard</li> <li>2. Timeline proses evaluasi SAKIP internal tidak jelas dan tidak ada info evaluator yg melakukan evaluasi sehingga proses konfirmasi pemenuhan kebutuhan dokumen SAKIP tidak bisa dilakukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan SIS untuk mengakselerasi perbaikan aplikasi SIMONEV</li> <li>2. Berkoordinasi dengan tim Inspektorat Wilayah I untuk memperjelas mekanisme evaluasi SAKIP Internal di tahun 2023.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan aplikasi baru berkoordinasi dengan SIS untuk penyusunan dokumen SAKIP karena aplikasi existing sulit dilakukan pengembangan</li> <li>2. Menyusun rencana tindak lanjut rekomendasi PANRB untuk perbaikan SAKIP BPS</li> <li>3. Pembinaan SAKIP untuk unit kerja pusat dan daerah</li> </ol>
Tujuan 3. Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik						
SS3.1. Terlaksananya transformasi statistik BPS						
1. Jumlah laporan transformasi statistik	Laporan	1	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan sumber daya tim EWS, sehingga supervisi pelaksanaan FGD Kuesioner EWS di 17 kab/kota tidak dapat dikunjungi semua</li> <li>2. Pendataan EWS yang semula dijadwalkan pada triwulan-4, tidak jadi dilaksanakan karena kegiatan survei untuk perusahaan sudah banyak dikhawatirkan menjadi responden burden</li> <li>3. Timeline pilot BCS Perluasan bergantung dari timeline ujicoba EWS.</li> <li>4. Penyusunan kuesioner kognitif BCS Perluasan harus menunggu draft kuesioner BCS Perluasan final.</li> <li>5. Padatnya pekerjaan anggota tim BCS sehingga sulit untuk mencari waktu melakukan koordinasi dan diskusi dengan tim dan PIK terkait.</li> <li>6. Perlu penguatan tim internal BPS dalam rangka peningkatan kualitas dan percepatan progress penyusunan rekomendasi EPSS.</li> <li>7. Pada penyampaian Hasil EPSS, banyak email yang tidak terkirim ke alamat tujuan karena kendala blast email, sehingga perlu dikirim berkali-kali atau meminta alternatif alamat email</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi pelaksanaan FGD kuesioner EWS dilaksanakan namun tidak pada seluruh daerah pelaksanaan</li> <li>2. Pelaksanaan pendataan EWS dijadwalkan pada triwulan-1 2024</li> <li>3. Menyelesaikan draft kuesioner BCS Perluasan</li> <li>4. Dilakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders untuk mendapatkan alternatif solusi terkait kendala dalam penyusunan rekomendasi EPSS</li> <li>5. Email dikirim berkali-kali atau meminta alternatif alamat email</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan rekap hasil FGD Kuesioner EWS</li> <li>2. Pelaksanaan pendataan EWS dijadwalkan pada triwulan-1 2024</li> <li>3. Pelaksanaan pilot BCS mengikuti rencana pendataan EWS dijadwalkan pada triwulan-1 2024</li> <li>4. Perlu dilakukan diskusi dengan PIK terkait yang akan dimulai pada awal tahun 2024.</li> <li>5. Perlu anggota tim yang komitmen dan dedicated untuk BCS.</li> </ol>
SS3.2. Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS						
4. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	Poin	81	83,48	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses finalisasi rancangan Perka pembangunan agen perubahan membutuhkan waktu yang lama saat diriviu oleh Tim Hukum BPS</li> <li>2. Rendahnya pelaporan pelaksanaan renaksi agen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan komunikasi yang intens dengan PIC tim hukum</li> <li>2. Menyusun surat permintaan laporan manajemen perubahan ke setiap unit kerja</li> <li>3. Mengundang beberapa K/L2 leading sektor untuk menjadi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan rapat harmonisasi akhir dengan tim Hukum supaya rancangan Perka dapat ditetapkan oleh Pimpinan</li> <li>2. Melakukan monitoring progres pelaksanaan dan</li> </ol>

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Triwulan IV			Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
	Satuan	Target Setahun	Realisasi Kumulatif			
				<p>AC dan genset saat ini masih belum selesai sehingga Perka Roadmap Sarpras, Buku Pedoman, dan Sistem Aplikasinya juga belum bisa disempurnakan untuk komponen sarpras di atas.</p> <p>4. Proses revidi, harmonisasi dan penetapan Perka yang dilakukan oleh Tim Hukum membutuhkan waktu lama</p> <p>5. Kebijakan pimpinan yang berdampak pada standar biaya, termasuk munculnya kegiatan baru</p> <p>6. Tingkat pemahaman penyusunan renstra yang masih berbeda-beda antar anggota tim</p> <p>Penyusunan Akuntabilitas</p> <p>1. Data untuk penyusunan LAKIN Triwulan Unit Kerja Pusat masuk berdekatan dengan waktu deadline, sehingga jadwal penyusunan LAKIN menjadi pendek</p> <p>Monitoring Program</p> <p>1. Aplikasi Laporan Pekerjaan Pimpinan, sering mengalami server error sehingga proses input laporan menjadi terkendala</p> <p>2. Masih ada beberapa Provinsi yang terlambat mengirimkan laporan bulanan atau data laporannya belum sesuai</p> <p>3. Pengolahan data dengan cakupan seluruh Satuan Kerja BPS Selindo yang masih dilakukan secara manual, membutuhkan waktu dan ketelitian untuk memastikan konsistensi data pagu, progress pengadaan, dan ketercapaian kegiatan</p> <p>Evaluasi dan Pelaporan Program</p> <p>1. Masih terdapat pelaporan data yang belum sesuai ketentuan baik itu pelaporan capaian output di aplikasi SAKTI maupun pelaporan komponen/RO di aplikasi emoney Bappenas</p> <p>2. Masih terdapat satker yang terlambat mengentri laporan semester I pada aplikasi SMART</p>	<p>Monitoring Program</p> <p>1. Melakukan koordinasi dengan programmer (Direktorat SIS) dari aplikasi untuk penanganan yang cepat, alternatif berikutnya adalah: penjajakan integrasi dengan aplikasi Kipapp</p> <p>2. Melakukan monitoring, reminder dan konfirmasi kepada PIC BPS Provinsi</p> <p>3. Pengolahan, konfirmasi ke satker, penyesuaian pagu dan perbaikan dilakukan pada akhir periode laporan</p> <p>Evaluasi dan Pelaporan Program</p> <p>1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan data agar lebih sesuai dengan ketentuan pelaporan</p> <p>2. Melakukan reminder dan koordinasi dengan PIC BPS Provinsi untuk percepatan entri laporan semester I SMART</p>	<p>Penyusunan Akuntabilitas</p> <p>1. Mempercepat deadline pengumpulan data capaian kinerja unit kerja Pusat</p> <p>Monitoring Program</p> <p>1. Pembuatan aplikasi baru sedang di jajaki kemungkinannya oleh direktorat SIS (Bulan Maret 2024)</p> <p>2. Melakukan reminder rutin kepada PIC data laporan monitoring PBJ (setiap tanggal 10)</p> <p>3. Pengumpulan dan pengolahan data tetap dilakukan menggunakan excel (setiap tanggal 10)</p> <p>Evaluasi dan Pelaporan Program</p> <p>1. Membuat pedoman pelaporan data yang lebih mudah dimengerti</p> <p>2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin (setiap bulan)</p>
2. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	Persen	95	96,49	<p>1. Adanya Belanja Modal yang tidak terealisasi</p> <p>2. Adanya Belanja Pegawai yang tidak terealisasi</p> <p>3. Anggaran ST2023 yang tidak terserap</p> <p>4. Pelaksanaan prinsip 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis) sehingga fullboard meeting di Satker Settama dibatasi</p>	<p>1. Monitoring pembangunan gedung kantor lebih ditingkatkan</p> <p>2. Evaluasi perhitungan dasar hitung Belanja Pegawai</p> <p>3. Pemenuhan kebutuhan pengolahan ST2023 seperti PC, UPS, dan Scanner</p>	Revisi DIPA

**ST 2023**  
SENSUS PERTANIAN

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

**DATA**

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. Dr. Sutomo No.6-8 Jakarta 10710  
Telp.:(021) 3841195, 3842508, 3810291-4  
Homepage: <http://www.bps.go.id>  
Email: [bpsHQ@bps.go.id](mailto:bpsHQ@bps.go.id)